“PEMIKIRAN DAN GERAKAN PRAWOTO MANGKUSASMITO TERHADAP ISLAM DAN NEGARA”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Program Strata Satu (S-1)
Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

Satriya Candra Pamungkas

NIM. A92216099

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Satriya Candra Pamungkas

NIM : A92216099

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "Pemikiran dan Gerakan Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan Negara (1910-1970)" ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau buah karya tangan saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari penelitian ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar keserjanaan yang saya peroleh

Sidoarjo, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan

Satriya candra pamungkas

NIM: A92216099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 12 November 2021

Oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Imam Ibnu Hajar, S. Ag., M. Ag.

INIP. 196808062000031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini ditulis oleh Satriya Candra Pamungkas (A92116099) telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Januari 2022

Ketua/Pembimbing

Dr. Imam Ibnu Hajar, S. Ag,. M. Ag
NIP. 196808062000031003

Penguji I

Drs. H. M. Ridwan, M.Ag
NIP. 195907171987031001

Penguji II

Dr. H. Achmad Zuhdi, DH, M.Fil.I
NIP. 196110111991031001

Sekretaris

Dwi Susanto, M.A
NIP. 197712212005010003

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Agus Aditoni, M. Ag
NIP. 196210021992031001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: SATRIYA CANDRA PAMUNGKAS
NIM	: A92216099
Fakultas/Jurusan	: Adab dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam
E-mail address	: xtkj4satriyapamungkas11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (…….....)
yang berjudul :

PEMIKIRAN DAN GERAKAN PRAWOTO MANGKUSASMITO TERHADAP ISLAM DAN NEGARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2022

Penulis

(Satriya Candra Pamungkas)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pemikiran dan Gerakan Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan Negara. Skripsi ini terfokus pada: 1. Bagaimana riwayat hidup Prawoto Mangkusasmito? 2. Bagaimana pemikiran Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan Negara? 3. Bagaimana gerakan Prawoto Mangkusasmito terkait Islam dan Negara?

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Sejarah. Langkah-langkah dalam penulisan metode sejarah meliput: *Heuristik* (pengumpulan sumber); *Verifikasi* (kritik sumber); *Interpretasi* (penafsiran sumber); dan *Historiografi* (penulisan sejarah). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan pendekatan sosiologis. Pendekaan historis, digunakan untuk menganalisis dan memberi kerangka penulisan terhadap obyek yang akan diulas secara diakronis. Pendekatan sosiologi, digunakan untuk menganalisis pola pemikiran dan tindakan-tindakanya di ruang-ruang publik. Sedangkan teori yang diimplementasikan yakni teori peran menurut Biddle serta Thomas.

Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwasannya: 1). Prawoto hidup sebagai aktivis Islam dari masa mudanya hingga akhir hayatnya, baik di bidang pendidikan, politik, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. 2). Prawoto memiliki pemikiran bahwa nilai-nilai Islam harus masuk dalam konstitusi dan undang-undang negara. Untuk itulah umat Muslim di segala bidang harus turut aktif dalam sistem dan partisipasi kenegaraan. 3). Prawoto menjalankan gerakan dan peranannya yang terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan, politik, serta dakwah-kemasyarakatan. Dalam bidang politik bergerak melalui Masyumi, di bidang pendidikan bergerak melalui STI dan YAPI, dan dalam bidang dakwah kemasyarakatan bergerak melalui DDII, KBIM, dan STII.

Kata kunci: Prawoto Mangkusasmito, Islam, Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This thesis is entitled “Prawoto Mangkusasmito's Thoughts and Movements towards Islam and the State. The focus of the discussion written in this thesis includes: 1). What is the life history of Prawoto Mangkusasmito?. 2). How is Prawoto Mangkusasmito’s thought about Islam and the State?. 3). How is Prawoto Mangkusasmito's movement towards Islam and the State?

The method used in this writing is the historical method. The steps in writing the historical method comprise: Heuristics (collection of sources), Verification (critic of sources), Interpretation (interpretation of sources) and Historiography (historical writing). The approach used in this research is a historical approach and a sociological approach. Historical approach, used to analyze and provide a writing framework for objects to be reviewed diachronically. Sociological approach, used to analyze patterns of thought and actions in public spaces. Meanwhile, the theory used to analyze is the role theory according to Biddle and Thomas.

The results of this thesis research conclude that: 1). Prawoto lived as an Islamic activist from his youth until the end of his life, in the fields of education, politic, da'wah, and social activities. 2). Prawoto has the thought that Islamic values should be included in the constitution and state laws. For this reason, Muslims in all fields must actively participate in the state system and participation. 3). Prawoto carries out his movements and roles in three fields, those are politics, education, and social da’wah. Politics his movement through Masyumi, education his movement through STI and YAPI, and the field of social da'wah his movement through DDII, KBIM, and STII.

Keyword: Prawoto Mangkusasmito, Islam, State.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik 8
F. Metode Penelitian 10
G. Penelitian Terdahulu 14
H. Sistematika Penulisan 16

BAB II RIWAYAT HIDUP PRAWOTO MANGKUSASMITO **18**

A. Latar Belakang Keluarga 18
B. Riwayat Pendidikan 21
C. Riwayat Organisasi 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PEMIKIRAN PRAWOTO MANGKUSASMITO TENTANG ISLAM DAN NEGARA 35

A. Pemikiran Prawoto Mangkusasmito Tentang Politik Islam 35
B. Pemikiran Prawoto Mangkusasmito Tentang Pendidikan 44
C. Pemikiran Prawoto Mangkusasmito Tentang Dakwah Kemasyarakatan .. 46

BAB IV GERAKAN PRAWOTO MANGKUSASMITO TERKAIT ISLAM DAN NEGARA 52

A. Gerakan Prawoto Mangkusasmito Terhadap Politik Islam 52
B. Gerakan Prawoto Mangkusasmito Terhadap Pendidikan 57
C. Gerakan Prawoto Mangkusasmito terhadap Dakwah dan Sosial 60

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Prawoto Mangkusasmito dan Istri ketika menjadi pengantin 21

Gambar 1. 2 Makam Prawoto Mangkusasmito di TPU Blok B, Kebayoran Baru Jakarta Selatan..... 34

Gambar 2. 1 Surat Pembubaran Partai Masyumi dari Presiden 68

Gambar 2. 2 Prawoto Mangkusasmito memimpin sidang BPKINP 69

Gambar 2. 3 Prawoto Mangkusasmito di tengah kawan-kawan se-Fraksi dalam Konstituante 69

Gambar 2. 4 Presiden memanggil Prawoto (Partai Masyumi) dan Partai Sosial Indonesia di Istana Merdeka 70

Gambar 2. 5 Prawoto Mangkusasmito di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia ... 70

Gambar 2. 6 Prawoto Mangkusasmito di tengah-tengah kaum tani 71

Gambar 2. 7 Omar Tusin, M. Hatta, Wilopo, dan Hamkah saat menunggu jenazah Prawoto Mangkusasmito tiba..... 71

Gambar 2. 8 Kediaman Prawoto Mangkusasmito di Kertosono..... 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prawoto Mangkusasmito dikenal sebagai Ketua Umum Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) terakhir (1959-1960). Prawoto menjadi ketua umum terakhir partai Islam tersebut setelah Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi (dari pusat hingga cabang) diseluruh wilayah Indonesia. Soekarno memberi dekret itu dengan dalih menyelamatkan bangsa dan negara. Partai Masyumi dianggap pemberontak dan para komandannya tergabung dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1960.[1]

Sejak awal pendirian Partai Masyumi pada tanggal 7-8 November 1945 saat Kongres Umat Islam, Prawoto terlibat aktif di dalamnya. Ia menjabat sebagai Sekretaris II Pengurus Besar Masyumi saat berdirinya partai tersebut di bawah pimpinan Soekiman Wirjosandjojo. Dari awal hingga akhir masa aktifnya Masyumi, ia menjadi salah satu yang terlibat aktif.[2]

Keaktifannya dalam partai Masyumi tercermin dari kehadirannya sebagai perwakilan dari Partai Masyumi di beberapa agenda kenegaraan. Tercatat seperti Dewan Konstituante, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), jajaran kabinet, Panitia Pemilu, dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

---

[1] Arsip. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 200 tahun 1960.

[2] Lukman Hakiem, S. U. Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi ke-2* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di era Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953) Prawoto dipercaya menjadi Wakil Perdana Menteri. Dalam jajaran kabinet tersebut terdapat juga perwakilan dari Masyumi yaitu Faqih Usman selaku Menteri Agama; Mohammad Roem selaku Menteri Dalam Negeri; dan Mohammad Sardjan sebagai Menteri Pertanian. Setahun kemudian, tepatnya bulan 3 Juni 1953 Kabinet Wilopo dibubarkan sesuai dengan KEPPRES Tahun 1953.[3]

Dalam Dewan Konstituante tahun 1956, Dewan perumus dasar negara tersebut diketuai oleh Wilopo (PNI), dan Prawoto dipillih sebagai Wakil Ketua (Masyumi) bersama dengan Fatchurrahman Kafrawi (NU); Sakirman (PKI); Lemimena (Parkindo); serta Hidajat Ratu Aminah (IPKI).[4] Setelah proklamasi kemerdekaan, ia dinobatkan sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Pada saat Soekarno dan Muhammad Hatta didaulat sebagai Perdana Menteri RIS setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), posisi Presiden RI kemudian diisi oleh Mr. Assat yang saat itu menjadi Ketua BPKNIP. Assat didaulat sebagai Pemangku Jabatan (*Acting*) Presiden. Kursi yang ditinggalkan Assat tersebut kemudain diisi oleh Prawoto sebagai Ketua KNIP tahun 1949-1950.[5]

Agresi Belanda II yang terjadi pada 19 Desember 1948 mengakibatkan Yogyakarta yang saat itu menjadi ibukota Indonesia diserbu dan dikuasai tentara Kolonial Belanda. Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah menteri ditahan.

---

[3] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Press, 1987), 224.
[4] Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1995), 35-36.
[5] Amrin Imran, et al., *Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Citra Pendidikan, 2003), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sjafruddin Prawiranegara bersama sejumlah tokoh di Bukittinggi, Sumatera membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Beberapa tokoh lainnya seperti Prawoto Mangkusasmito. R. Pandji Surooso, I. J. Kasimo, Zainul Arifin, dan Kasman Singodimedjo yang berada di pulau Jawa menjadi anggota komisariat PDRI di Jawa.[6]

Dalam bidang keagamaan, Prawoto Mangkusasmito tercatat pernah menjadi anggota Dewan Kurator Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang kini berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN). Saat Prawoto menjabat sebagai anggota DPRS-RI dan pimpinan fraksi Masyumi dalam lembaga tersebut, Prawoto memimpin delegasi parlementer ke Pakistan. Prawoto juga merupakan pendiri daan Ketua Umum pertama Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI) sampai tahun 1962.[7]

Prawoto Mangkusasmito banyak mengungkapkan pendapat dan pemikirannya melalui partainya, Masyumi. Dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tahun 1949, dibahaslah soal edukasi agama. Partai Masyumi yang dikomandoi oleh Prawoto Mangkusasmito mengharapkan edukasi agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Pembahasan tentang pendidikan agama tersebut sebenarnya telah mencapai tahap pasal-pasal rancangan undang-undang, telah diambil jalan tengan oleh ketua badan pekerja, dan dapat diterima oleh para menteri dan Masyumi.[8]

---

[6] Ibid., 27.
[7] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 120.
[8] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Sartono, pendapat dari Masyumi tersebut dianggap kurang tepat sebab belum menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh PNI. Fraksi Masyumi kemudian protes atas anggapan Sartono dan meninggalkan ruang rapat sebagai sebuah bentuk protes karena terjadi perubahan Rancangan Undang-Undang tersebut dan tidak diterimanya.

Partisipasi serta keaktifan Prawoto Mangkusasmito di partai Masyumi dianggapnya sebagai "Jihad Ashgar". Yang dimaksud dengan Jihad Ashgar adalah jihad yang lebih banyak meminta pikiran, kekuatan akal, dan kekuatan akhlak. Terkait Jihad Ashgar tersebut, Prawoto menyatakan bahwa itu bagian dari ajaran Islam.[9]

Prawoto mengedepankan landasan asas Masyumi, yaitu pasal II ayat 1 yang berbunyi, "Kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam adalah dengan mewujudkan cita-cita Islam dalam urusan ketatanegaraan. Sehingga penegakan Islam tak dapat dipisahkan dari Masyarakat, Negara, dan Kemerdekaan."[10] Pasal tersebutlah yang menginspirasi dan diperjuangkan oleh Prawoto Mangkusasmito lewat partai Masyumi. Seperti telah disebutkan di atas yaitu tentang memperjuangkan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah Indonesia.

Prawoto lewat partai Masyuminya juga memperjuangkan dasar agama Islam sebagai dasar negara Indonesia lewat Dewan Konstituante. Pemerjuangan

---

[9] Zulfikar Ghazali et al., *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo* (Jakarta: Depdikbud IDSN, 1998), 48.
[10] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga sebagai kelanjutan atas gagalnya tokoh politik Islam dalam menjadikan hasil Piagam Djakarta sebagai dasar negara Indonesia (Pancasila), yaitu anak kalimat yang berlafal, "Dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Usaha-usaha tersebut dilakukan oleh Masyumi lewat saluran demokrasi pemerintahan dengan mendapat kursi sebanyak-banyaknya di parlemen.

Masyumi tidak sendiri dalam mengikhtiarkan Islam sebagai dasar negara. Sewaktu musyawarah Majelis Konstituante pada 11 November 1957, menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapat dukungan dari Masyumi (112); NU (91); PSII (16); Perti (7); PTI (1), serta GPS (1). Meskipun akhirnya tidak berujung pada pemenangan Islam sebagai dasar negara Indonesia, dari hasil pemungutan suara tersebut nampak bahwa Masyumi menjadi corong terbesar dan utama dalam pemerjuangan ideologi tersebut, termasuk peran Prawoto yang menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Konstituante.[11]

Prawoto Mangkusasmito menganggap perjuangan Islam sebagai dasar negara sebagai bagian dari Jihad Ashgar. Selain itu pula Prawoto menyebut bahwa keberhasilan suatu perjuangan dapat diukur dengan kesuksesan Islam.[12] Ini menunjukkan bahwa kerja-kerja politik dan kenegaraan yang dilakukan oleh Prawoto selalu bersinggungan dengan Islam sebagai agama dan keyakinannya.

[11] Vicky Maria Ely Arumndani, "Perjuangan Partai Mayumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam Bidang Politik 1955-1959" (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, 2008), 56.
[12] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan politik Prawoto bermuara pada naiknya Islam sebagai titik puncak landasan negara Indonesia.

Oleh karena itu, tidak salah ketika Ir. Soekarno meluncurkan dekrit agar kembali kepada UUD'45. Kemudian dikritisi oleh Prawoto, ia berargumen bahwasannya maksud kembali kepada UUD'45 ialah menerapkan rumusan yang lebih pokok, yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."[13]

Terhadap konsistensinya sewaktu memperjuangkan Islam, Prawoto juga menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung Pancasila sebagai rumusan dasar negara. Prawoto mengatakan, "Kepada penganut agama-agama lain di luar Islam, kami menyatakan bahwa kami tidak menaruh keberatan sedikit pun apabila saudara-saudara di dalam rumusan-rumusan itu berkeinginan jaminan untuk menunaikan syariat agama golongan saudara." Lebih jauh, Prawoto menayatakan bahwasannya prinsip agama Islam jika dicerna secara akurat maka tidak aka ada agama lain yang merasa terancam.[14]

Mencermati beberapa fenomena terkait Prawoto Mangkusasmito sebagai tokoh Masyumi menjadikan dirinya sebagai tokoh alternatif selain Mohammad Natsir. Telah banyak penelitian yang mengkaji Mohammad Natsir sebagai tokoh utama Masyumi, terutama tentang pemikirannya dan kiprahnya di partai Masyumi. Namun Natsir bukanlah tokoh tunggal Masyumi. Prawoto adalah

[13] Ibid., 68.
[14] A. Suryana Sudrajat, *Kearifan Guru Bangsa, Pilar Kemerdekaan* (Jakarta: Erlangga, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu tokoh Masyumi lain yang memiliki kiprah besar dalam sejarah Masyumi dan pejuang Islam sebagai dasar negara.

Tidak hanya pandangan-pandangannya terhadap Islam dan negara, namun Prawoto disebut AR Baswedan sebagai "satunya kata dan perbuatan".[15] Maka, penelitian terhadap pemikiran Prawoto beserta tindakannya yang mengiringi tersebut menjadi menarik, terutama soal kajian agama dan negara. Mengkaji Prawoto dapat berarti meluaskan khazanah sejarah Islam, khususnya sejarah pemikiran dan gerakan Islam kenegaraan pada masa Orde Lama. Sehingga daripada itu, judul yang diangkat penulis pada riset ini yakni "Pemikiran dan Gerakan Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan Negara", yaitu bermaksud untuk menerangkan bahwa pemikiran dan gerakan Prawoto terkait gagasannya terhadap Islam dan negara tidak hanya ketika berada di Masyumi saja, namun juga pasca bubarnya Masyumi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana riwayat hidup Prawoto Mangkusasmito?
2. Bagaimana pemikiran Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan negara?
3. Bagaimana gerakan Prawoto Mangkusasmito terkait Islam dan negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui riwayat hidup Prawoto Mangkusasmito.

[15] Bajasut dan Hakiem, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui pemikiran dan pandangan Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan negara.
3. Mengetahui gerakan dan perjuangan Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai referensi pokok sejarah dan khazanah kajian Islam terkait Prawoto Mangkusasmito sebagai tokoh Islam masa Orde Baru.
2. Manfaat praktis: penelitian ini ditulis sebagai syarat kelulusan Sarjana (SI) jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Penelitian berjudul "Pemikiran dan Gerakan Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan Negara (1910-1970)." Mengaplikasikan dua pendekatan, yakni sejarah dan sosiologi. Pendekatan sejarah digunakan untuk menganalisis dan memberikan kerangkan penulisan terhadap objek kajian yang akan diulas secara diakronis. Maksudnya adalah objek kajian penelitian ini akan diteliti dan diulas runtut berdasarkan rentang waktunya.

Pendekatan Sosiologi digunakan untuk menganalisis pola pemikiran Prawoto dan tindakannya di ruang-runag publik. Keaktifan Prawoto di berbagai organisasi dan lembaga akan dibahas dalam kerangka sosiologis, yaitu interaksi dengan individu-individu maupun kelompok-kelompok. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, di harapkan akan didapatkan gambaran utuh mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengapa dan bagaimana Prawoto berprilaku, khususnya terkait islam dan kenegaraan.

Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian kali ini adalah teori peran. Teori peran yakni suatu persepsi dalam psikologi-sosial dan sosiologi Islam yang beranggapan mayoritas kegiatan individu diposisikan sebagai kelompok-kelompok yang diatur berdasarkan sosial.

Teori peran yang digunakan dalam riset ini ialah menurut perspektif Biddle dan Thomas, yaitu yang mereka artikan sebagai pelaku seperti dalam panggung sandiwara. Secara nyata, memerankan adegan sama halnya dengan memegang suatu kedudukan sosial di masyarakat. Peran lebih banyak merujuk pada aksi (action) yang diwujudkan dalam prilaku-prilaku di suatu waktu dan tempat sebagai pangunggnya.[16] Sebagai tambahan, menurut Levinson, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.[17]

Pada skripsi ini, objek penelitian yaitu Prawoto Mangkusasmito akan dianalisis pemikiran dan gerakannya dalam bingkai *kelakonannya* maupun unsur-usnur peranan yang dikemukakan oleh Levinson tersebut di tiap-tiap panggung sejarahnya, baik saat berada di Masyumi, Dewan Konstituante, maupun saat berada di Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia atau di wadah-wadah lain. Sehingga dari analisis tersebut, diharapkan akan mendapatkan pemahaman utuh terhadap kesinambungan pemikiran dan usaha-usahanya

[16] Edi Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1994), 7-8.
[17] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait Islam dan negara. Adapun analisis tersebut akan dimasukkan pada bab keempat.

F. Metode Penelitian

Objek penelitian ini akan diulas dan ditulis menggunakan metode sejarah. Seorang tokoh yang bernama Gillbert J. Garraghan seperti yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman mengungkapkan bahwa metode penelitian sejarah yaitu kaidah serta aturan analitis guna menghimpun sumber-sumber sejarah secara positif, kemudian dievaluasi dengan tajam, serta menarik kesimpulan dalam wujud tulis. Sementara Louis Gottchalk menjelaskan metode penelitian sejarah sebagai "proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam ini menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya." Dalam penelitian sejarah terdapat sejumlah langkah antara lain: Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.[18]

1. Heuristik

Heuristik (penghimpunan sumber) ialah teknik periset sewaktu menghimpun sumber-sumber, baik data ataupun jejak sejarah lainnya. Sumber sejarah dikatakan pula data sejarah. Heuristik adalah langkah awal dalam melaksanakan riset, dilakukan dengan menghimpun sumber primer dan sumber sekunder.[19] Adapun sumber-sumber itu yakni:

[18] Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 43-44.
[19] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu data asli sebagai fakta yang sezaman dengan terjadinya fenomena. Sumber primer juga dikenal dengan sumber langsung, misalnya: subjek (tokoh), stktur organisasi, dan lain-lain. Pada sumber data yang bersifat lisan, yang digunakan sebagai sumber primer adalah wawancara langsung dengan pelaksana peristiwa maupun saksi mata.[20] Dalam penulisan skripsi ini, peneliti hanya memanfaatkan referensi yang tertulis, baik primer maupun sekunder. Salah satu sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Lukman Hakiem dan S. U. Bajasut yang berjudul, "Alam Pikiran dan Perjuangan Prawoto Mangkusasmito; Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi."

Disebut primer karena buku tersebut adalah kumpulan surat yang pernah ditulis oleh Prawoto. Penulis buku tersebut adalah orang yang pernah bertemu langsung dengan Prawoto Mangkusasmito. S.U. Bajasut adalah sesama anggota Konsitutuante dari fraksi Masyumi. Surat terakhir dari PP Masyumi yang ditanda tangai langsung oleh Prawoto kepada anggota fraksi Masyumi di Konstituante dikirim langsung kepada Bajasut.[21] Beberapa saksi yang keterangannya dicantumkan dalam buku tersebut adalah orang yang juga bertemu dan beraktivitas langsung dengan Prawoto, seperti anak-anak Prawoto.

[20] Ibid., 56.
[21] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah informasi yang dimanfaatkan sebagai penunjang data primer. Data sekunder bisa disebut infomasai yang sudah disusun berdasarkan sumber primer. Dalam buku Metode Penelitian Sejarah disebutkan bahwa data sekunder adalah data yang tidak secara langsung disampaikan oleh saksi mata.[22] Dalam penulisan ini, sumber sekunder yaitu buku-buku dan jurnal seperti:

1) Zulfikar Ghazali, dkk, *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo* (Jakarta: Depdikbud IDSN, 1998)
2) Artawijaya, *Belajar Dari Partai Masyumi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014)
3) Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984* (Jakarta: CV Rajawali, 1984).
4) Amrin Imran, dkk, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Citra Pendidikan, 2003).
5) Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1995).

c. Verifikasi

Setelah menemukan sumber atau data untuk penulisan penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah melakukan kritik atau

[22] Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

verisifikasi. Kuntowijoto menjelaskan verifikasi terbagi menjadi dua, yakni: otensitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern.[23]

Pada penulisan skripsi ini, peneliti melakukan kritik intern dan kritik ekstern. Pada tahap kritik ekstern, peneliti melakukan pengecekan terhadap keaslian sumber yang dipakai oleh pengarang buku maupun jurnal yang dimanfaatkan sebagai sumber riset. Adapun pada tahap kritik intern, peneliti melakukan *cross check* terhadap referensi dalam penelitian ini, sehingga data didapatkan kredibel.

d. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang bermakna mempersatukan. Tujuan analisa sejarah yakni untuk membuat sintesis atas realita yang ditemukan dari sumber-sumber sejarah. Bersama dengan teori, informasi yang didapat dirangkai kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh.[24] Pada penelitian kali ini, penulis menafsirkan data-data yang didapat sehingga memunculkan sebuah sintesis dan eksplanasi yang mudah dimengerti dan kredibel.

[23] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 77.
[24] Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Historiografi

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam prosedur penelitian. Historiografi adalah penulisan sejarah berupa laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan sejarah. Maka setelah dihasilkan suatu interpretasi utuh penulis terhadap pemikiran dan gerakan Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan negara, peneliti menorehkannya menjadi sebuah laporan penelitian yang berbentuk karya tulis ilmiah. Dalam hal ini sistematika kepenulisan akan dibagi menjadi lima bagian yang saling berkorelasi sehingga menghasilkan Skripsi yang berjudul "Pemikiran dan Gerakan Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan Negara".

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Prawoto Mangkusasmito tidak banyak diproduksi oleh para akademisi baik dari kalangan mahasiswa maupun kalangan profesional. Pada penelitian kali ini difokuskan untuk membahas pemikiran Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan negara beserta gerakan dan perjuangan yang membarengi pemikirannya tersebut. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Riva Hardian Putra berjudul "Peranan Prawoto Mangkusasmito Dalam Partai Masyumi Tahun 1945-1960". Skripsi ini memfokuskan pada pembahasan keterlibatan dan keaktifan Prawoto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mangkusasmito dalam partai Masyumi.[25] Sedangkan pada penelitian kali ini, akan lebih fokus mengulas Prawoto dari segi pemikiran dan gerakannya sebagai implementasi pemikiran tersebut, baik dari sebelum berkiprah di Masyumi hingga Prawoto aktif di Dewan Da'wah Islamiyyah Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Selia Fauziah berjudul "Peranan Prawoto Mangkusasmito dalam Partai Masyumi (1945-1970). Skripsi ini tidaak jauh berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh M. Riva Hardian Putra, yaitu fokus membahas keterlibatan dan keaktifan Prawoto Mangkusasmito dalam partai Masyumi. Rentang waktu dibuat 10 tahun lebih lama oleh penulis karena ditambahakan dengan keteladanan-keteladanan Prawoto setelah purna dari Masyumi. Namun skripsi ini tidak menuliskan pemikiran dan gerakan Prawoto secara detail dan meluas setelah Prawoto tidak berpolitik,[26] sehingga berbeda dengan penelitian yang ditulis kali ini yang akan mendeksripsikan sekaligus menganalisis pemikiran dan gerakan Prawoto baik ketika Prawoto di Masyumi baik setelahnya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Vicky Maria Ely Arumndani berjudul "Perjuangan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam Bidang Politik". Skripsi ini fokus membahas usaha-usaha partai Masyumi di bidang politik dan perjuangan Masyumi di Majelis Konstituante,[27] tidak fokus

[25] M. Riva Hardian Putra, "Peranan Prawoto Mangkusasmito Dalam Partai Masyumi Tahun 1945-1960" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 53-62.
[26] Selia Fauziah, "Peranan Prawoto Mangkusasmito dalam Partai Masyumi (1945-1970) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 77.
[27] Vicky Maria Ely Arumndani, "Perjuangan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam Bidang Politik" (Skripsi, Universitas Santa Dharma, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas Prawoto Mangkuasmito sebagaimana yang ditulis dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menuliskan penelitian ini, peneliti membagi penulisan ke dalam lima bab. Sistematika penulisan ini dibuat secara runtut, berkaitan, dan bersifat akumulatif antara satu bab dengan bab berikutnya.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini berupaya untuk memberi pemaparan terkait kerangka penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Pada bab kedua akan dijelaskan terkait riwayat hidup Prawoto Mangkusasmito sejak kelahiran hingga kematiannya. Bab ini akan mendeskripsikan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan aktivitas-aktivitas Prawoto Mangkusasmito sebelum aktif terjun ke bidang politik dan setelah purna dari kegiatan politik praktis. Bab ini berupaya untuk memberikan gambaran awal dalam menganalisis pemikiran dan gerakan Prawoto.

Sedangkan dalam bab ketiga akan dilakukan pembahasan terkait pemikiran Prawoto Mangkusasmito terkait Islam dan negara. Pada bab ini juga akan dibahas soal pendapat, pandangan, dan pemikiran Prawoto Mangkusasmito terkait Islam, negara, dan hubungan keduanya dalam pembangunan negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam bab keempat akan dilakukan analisis terhadap aktivitas atau gerakan Prawoto Mangkusasmito yang berkaitan dengan Islam dan kenegaraan. Pemikirannya yang dideskripsikan dalam bab ketiga selanjutnya akan dianalisis dalam bab ini dengan menggunakan teori peran sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga Pada bab ini akan diketahui gambaran penuh terkait aktivitas-aktivitas dan gerakan yang dilakukan oleh Prawoto dalam mengimplementasikan pikirannya terhadap pembangunan Islam dan sistem kenegaraan di Indonesia.

Bab kelima yaitu penutup, penulis akan memberikan kesimpulan atas penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah. Di samping itu, pada bab ini juga akan diberikan rekomendasi yang ditujukan kepada peneliti-peneliti berikutnya yang melakukan pengkajian tehadap objek yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

RIWAYAT HIDUP PRAWOTO MANGKUSASMITO

A. Latar Belakang Keluarga

Di sebuah desa yang bernama Tirto, Grabag, Magelang Jawa Tengah lahirlah seorang bayi yang dikenal Prawoto Mangkusasmito pada 4 Januari 1910. 60 tahun kemudia ia meninggal dunia, tepatnya pada 24 Juli 1970.[28] Prawoto merupakan anak pertama dari pasangan Supardjo Mangkusasmito dan Suendah. Ayahanda Prawoto adalah seorang mantri[29] candu (bahan baku opium) yang bertugas mengawasi praktik penjualan candu yang marak pada saat itu. Dari pasangan ini, telah lahir pula adik Prawoto yang bernama Sugondo pada tahun 1914.[30]

Kedua orang tua Prawoto bercerai saat Prawoto berusia 10 tahun. Tiga tahun kemudian pada tahun 1923, Supardjo menikah dengan Sulbijah. Istri kedua Supardjo inilah yang merawat Prawoto hingga dia menginjak usia remaja. Sementara Suendah, ibu kandung Prawoto juga menikah untuk kedua kalinya. Pernikahan tersebut dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama Hadi Susanto dan Hadi Soesilo. Kondisi keluarga yang demikian membuat Prawoto terbiasa hidup mandiri. Mulai umur 17 tahun, ia hidup di luar lingkungan orang tua dan bersekolah tanpa biaya dari orang tua. Disebabkan oleh kondisi kesendirian

---

[28] Budi Harjo Sayoga, *Kamus Sejarah Indonesia Jilid II Nation Building* (Jakarta: Direktorat Sejarah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Th), 245.
[29] Mantri adalah Juru rawat kepala yang biasanya laki-laki. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa* Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 987.
[30] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito; Ketua Umum (Terakhir) Partai Masjumi*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itulah, menurut penuturan putrinya, Prawoto 'lari' ke buku. Hingga usia paruh bayanya, ia menekankan anak-anaknya untuk membaca buku yang bagus.[31]

Prawoto kemudian menikah dengan Rabingah. Perempuan yang dinikahinya itu adalah anak dari pemilik kos tempat Prawoto indekos saat Prawoto mengenyam pendidikan di *Algemene Middelbare School* (AMS) bagian B di Yogyakarta, atau setara dengan sekolah menengah atas. Pernikahan tersebut terjadi atas kehendak kedua orang tua Rabingah, yaitu Sudjiman Hardjotaruno dan Rubinem. Sudjiman tidak suka dengan Prawoto yang "pacaran" dengan Rabingah. Sudjiman menentang keras hubungan antara perempuan dan laki-laki di luar pernikahan. Oleh karena itu, meskipun Prawoto baru lulus AMS dan Rabingah masih menjadi siswa *Meer Uitgerbreid Lager Onderwijs* (MULO), Kedua orang tua Rabingah tidak ragu untuk membawa kedua anak tersebut ke penghulu dan kemudian dinikahkan.[32]

Sri Sjamsiar, putra sulung Prawoto menerangkan bahwa meskipun keduanya telah berstatus menikah, namun keduanya menjalankan "nikah gantung", yang berarti mereka tidak melakukan hubungan suami istri meskipun telah menikah. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa pasangan Prawoto-Rabingah baru menghasilkan keturunan sebelas tahun pasca perkawinan, Dari pernikahan ini, Prawoto memiliki empat orang anak yaitu Sri Sjamsiar (lahir tahun 1943), Arif Budiman (1946), Nuruddin Ahmad (1949), dan Ahmad Basuki (1952).

---

[31] Ibid., 3.

[32] Berdasarkan cerita putra sulung Prawoto Mangkusasmito, Sri Sjamsiar Prawoto Issom dalam Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prawoto dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Tan Eng Kie, seorang tokoh pergerakan dan aktivis partai golongan Kristen. Menyebut bahwa tokoh Masyumi tersebut hidup sangat sederhana dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk negara dan rakyat Indonesia. Kie menyebut bahwa Prawoto bukanlah seorang politikus yang memanfaatkan politik hanya demi uang. Biaya kehidupan sehari-sehari keluarga dibantu oleh istrinya. Padahal, momen menjabat sebagai komisaris perusahaan sangat banyak. Terlebih, ia pernah menjadi wakil perdana menteri dan pimpinan umum partai.[33]

Meskipun dirinya adalah tokoh politik dan pejabar negara, namun ia dan keluarganya sempat tinggal di rumah sewaan Jl. Kertosono 4, Jakarta. Berdasar catatan Hakiem, tokoh Partai Katolik, Ignatius Joshep Kasimo membantunya untuk membeli rumah itu. Berkat bantuan Kasimo, rumah milik suster Tan Kin Liang itu dapat dibeli oleh Prawoto pada tahun 1959, setahun sebelum partai Masyumi dibubarkan. Mochtar Lubis mendeskripsikan Prawoto sebagai orang yang khas dengan jenggot, kumis, kacamata, peci, serta kain sarung yang digunakan setiap hari. Lubis menyebut: "Orang yang tak pernah kenal padanya menyangka berhadapan dengan seorang guru besar atau seorang kiai alim. Ucapannya tenang dan sabar. Hampir tak pernah suaranya meninggi menyatakan kesal atau marah".[34]

[33] Artawijaya, *Belajar Dari Partai Masyumi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 132.
[34] Lukman Hakiem, *Jejak Perjuangan Para Tokoh Muslim Mengawal NKRI* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1. 1 Prawoto Mangkusasmito dan Istri ketika menjadi pengantin tahun 1932[35]

B. Riwayat Pendidikan

Soal pendidikan, Prawoto dapat dibilang lancar dalam mengenyamnya. Pada usia tujuh tahun yaitu tepatnya pada tahun 1917, Prawoto memasuki pendidikan *Hollands Inlandsche School* (HIS) atau setara pendidikan dasar. Selanjutnya Prawoto melanjutkan pendidikannya di MULO dan selesai pada Mei 1928. Pada saat di MULO itulah Prawoto berkenalan dengan Wilopo, Jusuf Wibisono, dan Muhammad Sardjan. Ketiganya adalah rekan politiknya di pemerintahan kelak.[36]

Pendidikan Prawoto tidak hanya berhenti di tingkat MULO saja, ketika lulus dari setingkat sekolah menengah atas tersebut, Prawoto sempat menjadi

[35] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 38.
[36] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru di sekolah MULO-Netral di Kebumen karena tuntutannya setelah menikah. Ia bekerja di sekolah tersebut hingga tahun 1935. Setelahnya Prawoto pindah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan di *Recht Hoge School* (RHS). Prawoto mengenyam pendidikan di RHS dari tahun 1935 hingga tahun 1942. Untuk menutupi biaya pendidikannya, Prawoto mengajar di sekolah Muhammadiyah. Biaya pendidikan Prawoto juga didukung oleh istrinya, Rabingah. Saat itu Rabingah telah bekerja di *Department van Neiverheid.*[37]

Pendidikan yang diikutinya selama kurang lebih tujuh tahun itu tidak berakhir mulus. Gelar *meester in de rechten* (Mr.) yang semestinya didapat Prawoto, tidak jadi dicapainya hingga akhir hayat. Menjelang ujian akhir, kesehatan Prawoto terganggu. Saat itu, teman seangkatannya adalah Kasman Singodimedjo dan Mohammad Roem. Prawoto kemudian meminta izin untuk penangguhan ujiannya. Izin tersebut diperoleh dan ujian ditangguhkan hingga kesembuhannya membaik. Setelah pulih, naas, Indonesia mengalami pendudukan oleh Jepang. Invasi Jepang tersebut mengakibatkan banyak kegiatan ditutup. Salah satunya adalah RHS. Sekolah itu ditutup oleh tentara Jepang. Karenanya, Prawoto gagal mendapatkan gelar Mr.

Prawoto merupakan pelajar yang tidak hanya aktif dalam pembelajaran formal. Ia juga menjadi aktivis organisasi pelajar. Pada saat Prawoto di AMS Yogyakarta, ia aktif menjadi anggota Jong Java, suatu perkumpulan pelajar yang berasal dari suku Jawa. Terdapat pula organisasi pelajar berdasarkan asal daerah lainnya sepertii Jong Celebes dan Jong Sumatranen Bond.

[37] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Jong Islameten Bond berdiri pada 1 Januari 1925 sebagai akibat dari ketidakpuasan beberapa aktivis muslim di Jong Java, Prawoto juga menjadi bagian dari organisasi pelajar Islam tersebut. Beberapa aktivis JIB yang kemudian menjadi tokoh nasional adalah Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, M. Natsir, dan Jusuf Wibisono. Tokoh seperti Agus Salim, disebut oleh Ridwan Saidi sebagai "Bapak Spiritualisme" bagi JIB. Prawoto menyebut Agus Salim sebagai seorang *briljant intellect.* Menurut Prawoto, daya Tarik Agus Salim terbesar adalah jalan pikiran dan politiknya yang kerap kali sukar dimengerti dan diikuti oleh massa. Sedangkan kebanyakan massa, lebih banyak mempergunakan rasa sentiment dalam arti yang baik daripada mempergunakan pikiran.[38]

Selain aktif di JIB, Prawoto juga aktif di *Studenten Islam Studie-club* (SIS). Organisasi dengan basis pelajar tersebut berdiri 8 tahun setelah JIB berdiri, tepatnya pada tahun 1933. Meskipun kedua organsisasi tersebut sama-sama berbasiskan pelajar, namun Ridwan Saidi menyebut ada perbedaan aksentuasi. Gerakan JIB berorientasi pada pengkaderan dan kegiatan kemasyarakatan seperti pendirian *Hollandsch Inlandssche School* (HIS). Sedangkan SIS berorientasi pada pendalaman ajaran agama Islam secara kritis dan tidak melakukan kegiatan kemasyarakatan. Tokoh lain yang merangkap keanggotan di JIB dan SIS selain Prawoto adalah Jusuf Wibisono yang juga sebagai orator saat pendirian SIS.[39]

---

[38] Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984* (Jakarta: Rajawali Press, 1984), 98.
[39] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam kepengurusan SIS, Prawoto menjadi pengelola perpusatakaan SIS dan redaktur majalah *Moeslemse Revielle*, majalah yang diterbitkan oleh SIS. Keaktifan Prawoto di majalah *Moeslemse Revielle* turut mendukung Prawoto menjadi Ketua SIS. Adapun jabatan Ketua SIS yang diemban oleh Prawoto merupakan jabatan ketua terakhir, Karena setelah Jepang melakukan pendudukan SIS dan JIB dibubarkan oleh tentara pendudukan Jepang.[40]

C. Riwayat Organisasi

Secara umum, keaktifan Prawoto dalam sebuah organisasi tidak terlepas dari dua bidang, yaitu bidang pendidikan dan politik. Namun selepas Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 oleh Presiden, ia juga aktif dalam bidang dakwah dan kemasyarakatan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Prawoto sempat menjadi guru di sekolah MULO-Netral di Kebumen karena tuntutannya setelah menikah. Ia bekerja di sekolah tersebut hingga tahun 1935. Pada saat ia melanjutkan sekolah di RHS, Prawoto bekerja sebagai guru di sekolah Muhammadiyah. Di tingkat pendidikan tinggi, Prawoto pun pernah menjadi sebagai pejabat di Sekolah Tinggi Islam (STI).

STI dibentuk adalah hasil consensus para tokoh muslim yang terhimpun dalam Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)[41], yaitu gabungan

---

[40] Ibid., 41.

[41] Masyumi ini bukanlah partai politik yang bernama sama dengan Masyumi yang didirikan pada 7 November 1945. Masyumi yang dimaksud adalah organisasi bentukan Jepang untuk mengganti Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang dibentuk oleh Mas Mansur, Wahab Hasbullah, dan Ahmad Dahlan pada 12 September 1937. Alasan Jepang membubarkan MIAI dan menggantinya menjadi Masyumi adalah untuk mengubah tujuan MIAI yang ingin menyatukan umat melepaskan diri dari penjajahan. Selain itu juga Jepang ingin mendekati golongan Islam. Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1996), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi bentukan Jepang sebagai pengganti Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Ketika tahun 1944, Masyumi memutuskan 2 dekrit yaitu membuat barisan mujahidin yang diberi nama Hizbullah dan membuat perguruan tinggi yang diberi nama STI. Hasil keputusan tersebut kemudian didiskusikan dengan para cendikiawan muslim, pemerintah dan kalangan swasta. Dari kalangan organisasi Islam, hadir diantaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Muhammadiyah, dan Pengurus Besar Persatuan Umat Islam. Hasil diskusi tersebut kemudian menghasilkan Panitia Perencana STI yang diketuai oleh Drs. Muhammad Hatta.[42]

Akhirnya, STI disahkan pada 8 Juli 1945 di Jakarta dengan susunan pengurus sebagai berikut: (1) Pengurus Badan Wakaf: Said Wiratmana Hasan (Ketua), Kartosoedarmo (Sekretaris); (2) Dewan Pengurus/Kurator: Drs. Mohammad Hatta (Ketua), Moh. Natsir (Sekretaris), K.H. Abdul Kahar Mudzakkir (Rektor), Prawoto Mangkusasmito (Wakil Sekretaris Sekretariat), dan A. Zainuddin (Bendahara).

Sebelum purnanya Prawoto di lapangan politik, Prawoto masih berkecimpung dalam dunia pendidikan. Sekitar tahun 1957, Prawoto mendirikan Lembaga Pesantren Pembangunan. Pendirian lembaga tersebut direncanakan dibangun di atas tanah seluas 8.000m^2 di daerah Kebayoran Lama, Jakarta. Namun setelah melalui proses pengurusan yang panjang, tanah tersebut akhirnya ditukar dengan tanah seluas dua hektar atau lebih dari dua kali lipat dari tanah

[42] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semula. Tanah tersebut berada di daerah Parung, Bogor. Pada tahun 2011, tanah tersebut diwakafkan kepada Pondok Pesantren Darul Muttaqin, ponpes yang dibangun semenjak tahun 1988.[43]

Di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1957, Prawoto membentuk Yayasan Pembangunan Umat (YPU) yang bertempat di masjid al-Furqan, Jln. Kramat Raya 45, Jakarta. Pembentukan yayasan tersebut merupakan inisiatif Prawoto untuk menyelamatkan aset Masyumi yang sedang berada dalam iklim politik yang mengancam. Ketika Dewan Dakwah Islamiyyah (DDII) Indonesia berdiri, aset-aset yang dimiliki oleh YPU dialihkan menjadi aset DDII.[44]

Namun diantara lembaga yang pernah didirikan maupun dikelola oleh Prawoto Mangkusasmito, yang terbesar adalah Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI) atau yang kini bernama Yayasan Pesantren Islam dengan singkatan yang sama. Prawoto mendirikan YAPI lima tahun sebelum ia mendirikan Lembaga Pesantren Pembangunan ataupun Yayasan Pembangunan Umat. YAPI didirikan dengan Akta Nomor 63 di Jakarta pada 29 Mei 1952. Prawoto mendirikan yayasan ini bersama Waromo Dwidjoyowuwono, Sindian Djajadiningrat, Joesdi Ghazali, Djamilus Nurut, Ismael Hassan, dan Hariri Hady. Selain Prawoto dan Sindian, pengurus YAPI lainnya adalah pelajar dan mahasiswa. Prawoto menjadi pendiri sekaligus Ketua pertama YAPI. Prawoto memangku jabatan tersebut hingga tahun 1962.[45]

---

[43] Hakiem, et al., *Pendiri dan Pemimpin Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia* (Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2017), 101.
[44] Ibid., 102.
[45] Ibid., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendirian YAPI ini dilatar belakangi oleh fenomena kembalinya para pelajar Indonesia di luar negeri. Mereka ingin melanjutkan studinya di dalam negeri karena peperangan selesai dan kedaulatan negara sudah diperoleh. Para pelajar tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal selama mereka melanjutkan pendidikan di Jakarta. Keprihatinan tersebut dialami oleh M. Natsir yang saat itu menjadi Perdana Menteri. Keprihatinan tersebut kemudian diceritakan oleh Prawoto.

Prawoto berinisiatif untuk mendirikn asrama pelajar yang berbadan hukum. Kemudian ia mengajak kader Masyumi yang juga menjabat pegawai tinggi Kemenrtian Keuangan, Sindian Djajadiningrat. Nama-nama seperti Mohammad Roem, H. Zainal Abidin Ahmad, Hafni Abu Hanifah dan Jusuf Wibisono tercatat sebagai pengawas dan penasihat YAPI.[46]

Yayasan ini mengelola asrama mahasiswa Sunan Gunung Djati di Jln. Bunga 7 Jatinegara. Asrama tersebut kemudian dikenal sebagai asrama YAPI Jalan Bunga. Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1962, dibangunlah asrama mahasiswa Sunan Giri di Jln. Sunan Giri 1 Rawamangun. Di awal kepengurusan, terdapat nama Mohammad Roem dan Jusuf Wibisono, rekan Prawoto di dari JIB hingga Masyumi. Asrama-asrama tersebut dibuat untuk melakukan kaderisasi dan pembinaan kepada para mahasiswa. Pada tahun 1952 tersebut, teman seperjuangan Prawoto ketika di JIB, Sjamsuridjal yang saat itu

[46] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjabat sebagai Walikota Jakarta Raya menghibahkan sebidang tanah di Kebayoran Baru. Di tanah tersebut kemudian didirikan Masjid Al-Azhar.[47]

Di bidang politik, setelah Jepang melakukan pendudukan di Indonesia, Prawoto bekerja sebagai pegawai kantor Kadaster[48] di Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Prawoto diangkat sebagai salah satu anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP). Prawoto mulai aktif di KNIP dari tahun 1946. Sebagai badan pekerja, Prawoto aktif hingga tahun 1949.

Aktifitas Prawoto di bidang politik tidaklah tanpa sebab yang menyertainya. Persentuhan Prawoto dengan politik dimulai saat Prawoto aktif di Jong Java, JIB, dan SIS. Beberapa aktivis Jong Java dan JIB seperti Sjamsuridjal, Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, M. Natsir, dan Jusuf Wibisono adalah teman seangkatan Prawoto yang sama-sama aktif dalam politik. Bahkan ketika di SIS, Prawoto berkenalan dengan Soekiman Wirjosandjojo, yang kelak menjadi Ketua Umum Partai Masyumi yang pertama. Saat perkenalan tersebut, Soekiman telah mendirikan Partai Islam Indonesia bersama dengan KH. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan Wiwobo. Dengan perkenalannya tersebut, Prawoto turut masuk dan aktif dalam PII.[49]

---

[47] A.M. Fatwa," Pengantar" dalam Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 17.

[48] Badan milik pemerintah yang melakukan pencatatan kepemilikan tanah terkait letak rumah, luas tanah, serta ukuran batasnya dalam menentukan pajak dan kebutuhan pemerintah lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa* Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 990

[49] Artawijaya, *Belajar Dari Partai Masyumi*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karir politik Prawoto di BP KNIP kemudian mengalami kenaikan. Setelah beralih menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949, Prawoto terpilih menjadi Ketua BP KNIP dari tahun 1949 hingga tahun 1950. Kenaikan jabatan ini dikarenakan saat RIS berdiri sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB), Soekarno dan Muhammad Hatta didaulat sebagai Perdana Menteri RIS. Posisi Presiden RI yang saat itu hanya sebagai negara bagian, diisi oleh Mr. Assat yang saat itu menjadi Ketua BP KNIP. Assat didaulat sebagai Pemangku Jabatan (*Acting*) Presiden. Kursi yang ditinggalkan Assat tersebut kemudain diisi oleh Prawoto Mahhkusasmito sebagai Ketua KNIP tahun 1949-1950.[50]

Kenaikan karir Prawoto di bidang politik juga sangat didukung oleh kehadiran partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi berdiri sewaktu momen Muktamar Islam Indonesia yang bertempat di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945. Muktamar ini dihadiri oleh hampir semua tokoh berbagai organisasi Islam dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang. Forum ini memutuskan untuk mendirikan Masyumi dan dijadikan partai politik utama untuk umat Islam. Tentu hasil kesepatakan tersebut sangat lumrah sebab diadakannya Muktamar karena umat Islam merasa bertanggung jawab atas resistensi dalam satu wadah politik sehingga mampu melangsungkan kewajibannya dalam berpolitik. Berdasar Anggaran Dasarnya, Partai Masyumi dimaksudkan untuk: (a) Menegakkan kedaulatan Republik

[50] Imran, et al., *Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Citra Pendidikan, 2003), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia dan agama Islam; (b) Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.[51]

Prawoto Mangkusasmito telah menjadi pengurus dalam struktur kepengurus Masyumi awal. Bahkan, Prawoto masuk dalam jajaran Pengurus Besar. Berikut jajaran Pengurus Besar Partai Masyumi pada saat didirikan: Dr. Soekiman Wirjosandjojo (Ketua), Abikoesno Tjokrosoesojoso (Ketua Muda I), Wali Alfatah (Ketua Muda II), Harsono Tjokroaminoto (Sekretaris I), Prawoto Mangkusasmito (Sekretaris II), serta Mr. R.A. Kasmat (Bendahara).

Di dalam kepengurusan Masyumi, Prawoto pun mengalami kenaikan jabatan. Dalam kepengurusan Masyumi tahun 1951, M. Natsir ditunjuk sebagai Ketua dan Prawoto ditunjuk sebagai Wakil Ketua I. Di kepengurusan Masyumi tahu 1954, Prawoto ditunjuk sebagai Sekretaris Umum. Dua tahun setelahnya, Mukatamar VIII Masyumi menunjuk Prawoto sebagai Wakil Ketua II. Tiga tahun setelahnya, dalam Muktamar IX atau Muktamar Masyumi yang terakhir sebelum dibubarkan oleh Pemerintah, Prawoto ditunjuk sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat. Di jabatan terakhir tersebut, Prawoto dibantu oleh para Pengurus Harian yaitu Soekiman Wirjosandjojo, K.H. Faqih Usman, Mohammad Roem, Anwar Harjono, Osman Raliby, Yunan Nasution, dan Hasan Basri.[52]

Keaktifannya dalam Masyumi itu memberikan andil cukup besar dalam karir Prawoto di bidang politik selain sebagai Ketua BP KNIP. Ketika Sjafruddin

---

[51] Deliar Noer, *Partai Islam dalam Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta:Grafiti Press, 1987), 47.
[52] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 26-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prawiranegara menegakkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) karena Ibukota Yogyakarta diduduki oleh Belanda serta Soekarno dan Hatta ditangkap, Prawoto menjadi anggota PDRI Komisariat Jawa. Satu tahun setelahnya yaitu tahun 1950, Prawoto ditunjuk sebagai penasihat delegasi Republik Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga sempat menjabat Wakil Ketua Panitia Negara sewaktu peninjauan kembali hasil KMB.[53]

Sejak tahun 1952, Prawoto telah menjadi anggota legislatif (waktu itu DPR Sementara) dan memimpin fraksi Partai Masyumi. Ketika kabinet pimpinan Wilopo berdiri, Prawoto ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri sebagai perwakilan dari partai Masyumi. Prawoto Mangkusasmito menjadi Wakil Perdana Menteri RI dari 2 April 1952 hingga 31 Juli 1952. Tiga tahun kemudian, setelah Pemilihan Umum 1955, Prawoto menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Konstituante. Dalam sidang-sidang Konstituante Prawoto dengan Masyuminya berupaya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Prawoto menjadi Wakil Ketua I Dewan Konstituante hingga dewan tersebut dibuyarkan oleh Presiden Soekarno lewat Dekrit 5 Juli 1959.[54]

Ketika Partai Masyumi dibubarkan oleh Presiden lewat Keputusan Presiden No 200 tahun 1960, Prawoto dijebloskan ke dalam penjara pada 16 Januari 1962 atau dua tahun setelah pembubaran Masyumi. Prawoto dimasukkan ke dalam penjara bersama aktivis Masyumi lainnya seperti Isa Anshari, E.Z. Muttaqien, Yunan Nasution dan Mohammad Roem. Mereka ditaruh di Rumah

[53] Hakiem, et al., *Pendiri dan Pemimpin Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.,* 102.
[54] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahanan Militer (RTM) Madiun. Kemudian mereka dipindahkan ke Wisma Keagungan, Jakarta, bersamas dengan Moh. Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Sjafruddiin Prawiranegara. Mereka baru dibebaskan setelah Orde Lama tumbang. Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan mereka dari penjara pada 17 Mei 1966, atau setelah 4 tahun masa penahanan.[55]

Setelah para eks aktivis Masyumi keluar dari penjara, mereka bertemu pada acara halal bi halal di akhir Februari 1967. Pada pertemuan itu lahir gagasan untuk mendirikan organisasi yang bergerak di bidang dakwah. Nama organisasi dakwah yang dipilih adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). DDII dibentuk dalam bentuk sebuah yayasan. Bentuk yayasan dipilih karena pengurusannya hanya melalui akta notaris sehingga tidak ada kecurigaan dari Pemerintah sebagai usaha lain untuk merehabilitasi Masyumi. Pendirian organisasi dakwah ini diangankan mampu menyinari umat tanpa memicu suara berisik serta polusi yang bersifat politis.

Maka pada 9 Mei 1967, dalam Akta Notaris Nomor 4, didirikanlah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan sepuluh orang pendiri yaitu: Moh. Natsir (Ketua), H.M. Rasjidi (Wakil Ketua), Buchari Tamam (Sekretaris), Nawawi Duski (Sekretaris II), H. Hasan Basri (Bendahara), H.M. Daud Datuk Palimo Kayo (Anggota), K.H. Taufiqurrahman (Anggota), Prawoto Mangkusasmito (Anggota), Abdul Hamid (Anggota), H. Abdul Malik Ahmad (Anggota).[56]

---

[55] Ibid., 15.
[56] Hakiem, et al., *Pendiri dan Pemimpin Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia., 14.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Dakwah disebut Natsir sebagai mesin pembangkit listrik yang bertempat di belakang rumah, dalam satu lokasi dipertimbangkan khusus di bawah tanah supaya tidak menimbulkan kebisingan. Dengan fungsi tersebut diharapkan dapat menerangi umat Islam tanpa suara berisik sebagaimana yang telah dialami oleh para pendiri Dewan Dakwah tersebut saat berada di Masyumi.[57]

Ketika sudah berada di masa akhir hayatnya, Prawoto aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Beliau menjadi penasehat aktif Sarekat Tani Islam Indonesia (STII), sebuah perserikatan petani Muslim yang didirikan di Yogyakarta pada 26 Oktober 1946. Ia juga menjadi penasihat Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penasihat, ia melakukan *tourni* (turun ke bawah). Terkait dengan *tourni* tersebut, Prawoto pernah mengatakan pada M. Natsir:

> Apabila saya kembali dari *tourni*, melihat kampung-kampung dan desa-desa, berbicara dengan pak tani yang lemah itu, yang tidak pandai membaca surat kabar, dan yang tak pernah disebut-sebut namanya dalam surat kabar, saya merasa mendapat satu kekuatan baru. Saya melihat keadaan mereka, saya membicarakan dengan mereka persoalan-persoalan hidup yang langsung mereka hadapi, saya kembali dengan harapan baru. Hal itu tidak saya jumpai di dalam masyarakat, di kota-kota yang besar, yang bertimbun-timbun dengan lekturnya yang banyak. Kekuatan dari pimpinan itu sendiri terletak di tangan kaum yang lemah.[58]
>
> Terkait dengan STII ini, Prawoto meninggal dunia saat melakukan perjalanan dalam melaksanakan jabatannya sebagai penasihat STII. Pada pertengahan tahun 1970, Prawoto berkeliling Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta untuk mengisi serangkaian pelatihan STII. Ia berkeliling di daerah tersebut bersama rekannya

[57] Ibid., 13.
[58] Ibid., 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang bernama M.D. Hasbullah dan Abdul Qadir Djaelani. Ketika perjalanan dilanjutkan ke Jawa Timur, Hasbullah dan Djaelani kembali ke Jakarta sedangkan Prawoto melanjutkan perjalanan. Serangkaian kegiatan akan dilangsungkan di Jember dan Banyuwangi.

Prawoto kemudian bertemu dengan para petani yang berada di Temuguruh, Banyuwangi. Dalam kunjungannya itulah, Prawoto wafat pada 24 Juli 1970. Kabar kematian itu didengar oleh Hasbullah dan Djaelani saat sudah tiba di di Jakarta. Sesuai dengan wasiatnya, Prawoto dimakamkan di sebelah makam sahabat karibnya, K.H. Faqih Usman yang merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pemakaman berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blok P, Jakarta Selatan. Pada tahun 1997, makam Prawoto ditransmigrasikan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.[59]

Blok P, pemakaman Kebayoran Baru "Pahlawan itu bukan ditentukan oleh tempat dimana dia dimakamkan, tetapi ditentukan oleh jasa-jasanya. (Moh. Roem). Disinilah jasad Prawoto dimakamkan, pada 1997 makam tersebut dipindahkan ke TMP Kalibata sebagai penyandang Bintang Mahaputera Adipradana.

Gambar 1. 2 Makam Prawoto Mangkusasmito di TPU Blok B, Kebayoran Baru Jakarta Selatan[60]

[59] Ibid., 107.
[60] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN PRAWOTO MANGKUSASMITO TENTANG ISLAM DAN NEGARA

A. Pemikiran Prawoto Mangkusasmito Tentang Politik Islam

Prawoto Mangkusasmito merupakan aktivis partai basis Islam, yakni partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sejak partai berlabel bulan bintang itu berdiri hingga saat bubar pada tahun 1960. Saat berdirinya partai Masyumi pada 8 November 1945, Prawoto menjabat sebagai Sekertaris II. Sedangkan saat Masyumi bubar pada 17 Agustus 1960, Prawoto menjabat sebagai Ketua Umum. Jadi pada saat berakhirnya partai tersebut, Prawoto adalah Ketua Umum terakhir Masyumi.[61]

Aktif dalam Masyumi selama 15 tahun, Prawoto banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan, diantaranya saat berada di acara internal partai, saat berada di arena forum Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) sebagai ketua fraksi, maupun saat duduk di Majelis Konstituante. Beberapa pernyataan tersebut mengandung konsep-konsep pemikiran yang merefleksikan gagasan Prawoto khususnya perihal konsep agama dengan negara.

Hal pertama yang perlu dimengerti sebelum memahami konsep pemikiran Prawoto khususnya di bidang politik yaitu bahwa Prawoto merupakan seorang yang menjunjung tinggi hukum dan mengedepankan

[61] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito; Ketua Umum (Terakhir) Partai Masjumi*, 26-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legalitas formal. Kerangka pemikiran tersebut menurut Deliar Noer, Prawoto telah terlatih dalam ilmu hukum pada masa sebelum Perang Pasifik. Prawoto sering merujuk kepada konstitusi yang menurut pendapatnya harus ditegakkan sampai ia dinyatakan tidak berlaku secara hukum. Selain itu, Soekiman –Ketua Umum Masyumi pertama sekaligus kawan Prawoto di Studenten Islam Club– menyebut Prawoto sebagai seorang realis. Ia merupakan pemikir dan pejuang politik yang mendasarkan pemikirannya pada keadaan yang nyata.[62]

Salah satu pemikiran utama dan mendasar dari Prawoto Mangkusasmito yang sering disuarakan dalam mimbar politik ketika berada di Masyumi adalah tentang penegakkan syariat Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia. Prawoto menyeru kepada umat Islam yang berpartisipasi dalam politik hendaknya tidak melenceng dari kaidah-kaidah agama. Menurutnya, suatu tindakan termasuk tindakan politik yang sudah melenceng dari agama malah akan membuat kerusakan. Seruan Prawoto itu, menurutnya, sebagai antitesis dari perkataan Muhammad Abduh yang menyebut *la'natullah 'ala siyasah* (Semoga Allah melaknat politik). Sehingga Prawoto mengatakan: "Mari buktikan, bahwasanya kami bisa berpolitik artinya dapat mengukuhkan hak dan kebenaran", *li i'la'i kalimatillah,* dalam tiap-tiap tindakan yang dilakukan".[63]

---

[62] Ibid., 25.

[63] Pidato Prawoto saat ulang tahun Masyumi ke-6 tahun 95. Ibid., 32; tentang pernyataan Abduh yang dikutip oleh Prawoto tersebut tidak ditemukan oleh penulis dalam referensi-referensi lain. Abduh memang tidak mengeluarkan pemikiran politik yang kompleks dan lengkap. Ia lebih moderat. Abduh hanya menekankan perlu adanya sebuah konstitusi yang jelas dan kepemimpinan yang benar sesuai ajaran Islam. Antony Black, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Nabi hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi, 2006), 552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat halal bi halal Masyumi terakhir yang diselenggarakan Masyumi wilayah Jakarta, tepatnya 4 bulan sebelum partai tersebut dibubarkan, Prawoto menyatakan bahwa dalam sebuah perjuangan yang dilakukan umat Islam, maka rugi dan untung dalam berjuang tersebut harus diperhitungkan dengan Islam. Jika dalam berjuang tersebut tidak memberi keuntungan untuk tegaknya ajaran Islam dan malah mendegradasinya, maka perjuangan tersebut dapat bernilai rugi. Di kesempatan lain, Prawoto menekankan bahwa perjuangan umat Islam tersebut mesti tidak boleh lepas dan melenceng dari hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh negara.

Pasca Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan RI No. 200/1960 tentang pembubaran Masyumi, Prawoto mengeluarkan memorandum. Salah satu isi memorandum tersebut adalah seruan umat Muslim agar selalu taat pada janji dan hukum. Janji tersebut termasuk janji yang dibuat oleh umat Muslim bersama umat agama lain, dimana yang dimaksudkan yakni UUD RI 1945. Prawoto menekankan: "Begitulah pandangan hidup yang ditanamkan dalam kalbu seorang Muslim. Oleh karena itu, dalam segala daya upaya kami, selalu diusahakan supaya asas hukum (*beginsel van recht*) yang menonjol ke muka, bukan asas kekuasaan (*beginsel van macht*). Lebih jauh, Prawoto menegaskan:

> Orang yang benar-benar memperjuangkan Islam tidak bisa lain dari bertujuan supaya hukum Islam berlaku dan terutama untuk si pejuang itu sendiri,hukum Islam dengan segala batas dan larangan-larangannya, yang tidak boleh dilanggar oleh si Muslim yang kebetulan sedang berkuasa. Demikian pula di dalam negara hukum.[64]

[64] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa pernyataan di atas mengindikasikan bahwa pernyataan resmi Prawoto sebagai pimpinan partai selalu dilandasi dengan penjunjungan yang tinggi terhadap suatu hukum yang sesuai dengan menggunakan kaidah yang baik, bahkan baik dalam pandangan Islam. Tujuan dan perjuangan politik Masyumi, sebagaimana disampaikan dan dijalankan oleh Prawoto adalah untuk menjadikan hukum Islam sebagai dasar hukum.

Pada pasal III Anggaran Dasar Partai Masyumi, disebutkan bahwa Partai Majlis Syuro Muslimin Indonesia bertujuan untuk melaksanakan suatu perintah berdasarkan syariat Islam untuk diaplikasikan didalam keseharian masyarakat, Negara untuk mencapai keridaan sang pencipta. Dalam hal ini, Kuntoeijoyo berpendapat bahwa Partai Majlis Syuro Muslimin Indonesia bertujuan untuk membentuk suatu negara Islam bersifat teokratis yang demokratis.[65]

Dalam sidang Konstituante, partai Masyumi tidak sendiri dalam memperjuangkan hukum Islam sebagai hukum resmi negara. Terdapat beberapa elemen Islam lain seperti Nahdlatul Ulama. Golongan Islam menghendaki redaksi Pancasila kembali ke Piagam Jakarta, sedangkan pemerintah menghendaki untuk ke Undang-Undang Dasar 18 Agustus tanpa amandemen. Pemungutan suara dilakukan hingga 3x, yakni terjadi pada 30 Mei, 1 Juni, serta 2 Juni 1959. Pengambilan suara pada 30 Mei dengan 478 anggota mendapatkan hasil 269 yang pro dan 199 kontra. Kemudian dilanjutkan tanggal 1 Juni dengan 469 anggota yang hadir, perolehan yang

[65] Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapat 264 yang pro dan 204 kontra. Pada tanggal 2 Juni dengan jumlah anggota yang hadir yakni 469, perolehan 263 pro dan 203 kontra. Hal tersebut dikarenakan usul fraksi Islam yang menghendaki untuk kembali kepada piagam Jakarta maupun usul dari pemerntah yang menghendaki untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 18 Agustus tanpa amandemen masing-masing tidak mendapatkan dua atau 3 suara. Untuk itu keduanya belum mencapai mufakat dan diputuskan oleh Konstituante.[66] Pilihan hanya ada di dua usulan tersebut, tidak ada kompromi dan usaha-usaha dari pihak pemerintah untuk mendialogkan dan menampung keinginan fraksi Islam di masa akhir Konstituante tersebut. Padahal, Prawoto bersedia untuk berdialog lebih panjang: "Bila kompromi terjadi, maka saya beserta fraksi bersedia melakukan kompromi itu," ujar Prawoto[67]

Soal perjuangan melalui politik tersebut, Prawoto memiliki konsepsinya tersendiri. Lima tahun pasca kemerdekaan, yang juga berarti lima tahun perjuangan Masyumi, dianggap Prawoto sebagai jihad *sughro* (jihad kecil.) Yang dimaksud Prawoto sebagai lima tahun perjalanan Masyumi dan bangsa Indonesia adalah ketika negara masih menghadapi perlawanan bersenjata, termasuk yang dilakukan oleh barisan Hizbullah dan Sabilillah. Begitu pula ketika terjadi perang gerilya yang dikomandoi oleh Jendral Soedirman, lalu pembentukan pemerintah darurat di Bukittinggi akibat

[66] Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Bandung: Pustaka, 1981), 95.
[67] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendudukan Belanda. Fase jihad sughra tersebut disebut Prawoto sebagai fase pertama.

Berikutnya fase kedua, disebut sebagai jihad akbar (jihad besar). Fase ini berlangsung tidak dalam kondisi perang dan tak stabli sebagaimana fase pertama. Fase kedua berada dalam keadaan damai, dalam masa pembangunan, selain itu pada fase ini juga dituntut untuk menggunakan kekuatan fikiran dan akal serta akhlak dalam melaksanakan pekerjaan. Pada masa ini pula, menurut Prawoto, terdapat dua masalah yang mesti diperhatikan. Pertama adalah lapangan usaha, dan kedua adalah tentang norma-norma kehidupan yang luhur.[68]

Menurut Prawoto, pemahaman orang terhadap politik hanya berkisar soal kabinet dan dewan-dewan perwakilan, dan tidak memahami bahwa politik bersangkutan erat dengan soal-soal ekonomi dan sosial dalam arti luas. Adapun politik itu sendiri merupakan sebuah alat, bukan tujuan. Bagi umat Islam, tujuannya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi jika alat tersebut disalahgunakan dan tidak memperhatikan halal-haramnya, maka alat tersebut akan menjadi azab. Maka dengan konsepsi tersebut, diterapkanlah ke dalam Masyumi dengan hal-hal yang menurut Prawoto perlu dilakukan oleh Masyumi:

1. Perlu adanya kebulatan tekad umat guna menyesuaikan tenaga didalam perpolitikan yang sebelumnya besar.

[68] Tulisan Prawoto Mangkusasmito di Suara Masjumi, No 11/12 Tahun VI, November-Desember 1951 dalam Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengikhtiarkan untuk mencapai harmoni dengan kepentingan-kepentingan di luar umat Islam agar terhindar dari pertentangan-pertentangan.
3. Masyumi hendaknya melakukan perjuangan yang berjalan parallel dengan kehidupan bernegara dengan ikut bertanggung jawab atas persoalan-persoalan.
4. Dalam menghadapi persoalan-persoalan hendaknya partai menggalang kembali kekuatan pikiran, kekuatan akal, dan kekuatan akhlak.
5. Adanya penekanan perluasan lapangan usaha dalam bidang ekonomi.
6. Memandang semua perjuangan partai politik dengan dasar kaidah-kaidah agama.
7. Mengakomodasi pertentangan pendapat antar partai atau golongan sebagai indikasi adanya persatuan yang mengarah pada demokrasi.
8. Menentukan suatu kepantasan berpolitik dengan adanya norma-norma, sehingga kehidupan politik dapat dijadikan seni tersendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengoreksi diri terhadap potensi politik yang dimiliki.
9. Hendaknya Masyumi tetap pada khittah perjuangan dalam menempuh jalan yang masih panjang.[69]

Di akhir masa kepemimpinannya, Prawoto tetap menjalankan prinsip-prinsip politiknya, yaitu taat kepada hukum dan menjalani hukum yang

[69] Ghazali, et al., *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku, meski hukum yang muncul merugikan dirinya. Salah satunya adalah saat Presiden Soekarno membubarkan Konstituante lewat Dekrit 5 Juli 1959 dan pembubaran Masyumi lewat Keputusan Presiden RI N. 200/1960. Meskipun Prawoto juga menempuh jalur hukum untuk menentang keputusan Presiden tersebut yang kemudian kalah di pengadilan, Prawoto tetap menaati produk hukum final tersebut. Dalam memorandumnya kepada Presiden Soekarno, Prawoto menyatakan:

> Salah satu ciri yang menjadi pembawaan Masyumi mulai didirikan hingga saat sekarang ini ialah usahanya yang tak henti-hentinya untuk memperkokoh hukum, berpegang kepada UUD yang berlaku sebagai sendi kehidupan bernegara. Selanjutnya menjadi ikatan janji unsur yang prinsipil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Umat Islam dibesarkan untuk teguh memegang janji itu…. Begitulah pandangan hidup yang ditanamkan dalam kalbu seorang Muslim.[70]

Pemikirannya terkait politik Islam dan kenegaraan tidak berhenti meskipun jabatan politiknya telah berakhir. Komitmen dan konsistensi pemikirannya terkait hal tersebut justru nampak karena adanya ketidakter putusan itu. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan tersebut pasca purna dari Masyumi masih termasuk soal Islam sebagai dasar negara, disamping isu-isu keummatan lain seperti dakwah, kepemudaan, dan keberagaman.

Pada saat momen pertemuan keluarga besar Bulan Bintang di Jakarta Raya pada tangal 24 Oktober 1966, dimana prawoto berpidato bahwa salah satu yang disampaikan adalah upaya fraksi-fraksi Islam untuk mengembalikan Piagam Jakarta sebagai dasar negara Republik Indonesia.

[70] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prawoto menyatakan bahwa fraksi Islam yaitu Masyumi, NU, PSII, PERTI mengajukan amandemen dasar negara yaitu kembali ke perumusan Pancasila yang terasli, yaitu Piagam Jakarta. Tujuh kata yang selalu dikumandangkan adalah, "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam untuk pemeluk-pemeluknya."[71]

Perkataan-perkataan tersebut menurut Prawoto, ada di dalam *formulering* (perumusan) Pancasila yang tertuang di Piagam Jakarta namun tidak ada di dalam *formulering* Pancasila yang kedua yaitu yang dipakai oleh Pemerintah saat itu. Dalam sidang Konstituante, yang menyokong Piagam Jakarta hanya sebesar 43 persen. Sedangkan yang mendukung undang-undang 18 Agustus sebesar 57 persen. Partai-partai yang mendukung pilihan kedua disebut Prawoto sebagai penyokong palsu yaitu golongan anti-Tuhan. Diantara partai-partai tersebut ialah Parta Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Sosialis Indonesia. Di kesempatan lain, Prawoto mengatakan: "Mengapa rumusan Piagam Jakarta yang dicapai melalui pelbagai kesulitan dan menguras otak dan energy para pemimpin nasional kita, berubah dalam beberapa menit saja dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945? Mengapa, mengapa, mengapa?"[72]

Prawoto juga masih memiliki atensi yang sangat besar terhadap partisipasi umat Islam Indonesia di ruang-ruang politik seperti DPR. Hal

[71] Ibid., 261.
[72] Yudi Latif, *Inteligensia Musli dan Kuasa; Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dimaksudkan Prawoto agar permasalahan umat dapat dipecahkan, terutama hal-hal yang membutuhkan kebijakan dari negara. Ia mengatakan: "Apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan/badan perwakilan. Inikah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Lebih jauh, Prawoto mengatakan:

> Jika memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar dari kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam…. Ibarat Badan Perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja sekeras-kerasnya sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu hukum Islam pula…. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja.[73]

B. Pemikiran Prawoto Mangkusasmito Tentang Pendidikan

Konsepsi dan komitmen Prawoto terhadap Islam di tataran kenegaraan dan hukum adalah tentang rancangan Undang-Undang pendidikan Islam di sekolah pada sidang BP KNIP. Prawoto Mangkusasmito menjabat sebagai Ketua Fraksi parta Masyumi dalam sidang tersebut. Diantara yang dikumandangkan oleh Prawoto di sidang BP KNIP yakni:

1. Kewajiban dalam mengajarkan ajaran Islam di dalam sekolah negeri
2. Supaya kewajiban belajar yang berlaku untuk semua anak dari umur 8 tahun sampai 14 tahun dapat dipenuhi dengan bersekolah di sekolah-sekolah agama (madrasah-madrasah).

[73] Tulisan Prawoto dalam surat kabar milik Masyumi yaitu Abadi 8 Juli 1969. Lihat Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 405-407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pasal yang berbunyi: “guru-guru tidak suatu aliran agama atau keyakinan hidup maupun memprogandakannya” agar diubah dengan redaksi yang lebih positif karena memunculkan sikap guru-guru yang negatif terhadap aliran agama atau keyakinan hidup”.[74]

Poin kedua dan ketiga yang disampaikan oleh Prawoto, diterima dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Tentang pembelajaran di madrasah dapat dijadikan pemenuhan wajib belajar dikabulkan dalam Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi: “belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.” Dengan diterimanya ketentuan tersebut, tercapailah dua hal. Pertama, kelangsungan hidup madrasah-madrasah terjamin. Kedua, mutu dari pelajaran dan keadaan madrasah-madrasah harus diperbaiki jika ingin hidup terus. Dengan pengakuan dari Menteri Agama tersebut berlaku untu anak usia 8 hingga 14 tahun.

Adapun pada poin ketiga, tercapai pula perubahan redaksi dengan undang-undang Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi: “Di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap aliran agama atau keyakinan hidup.” Dengan demikian, menurut Prawoto, diharapkan sikap acuh tak acuh dari guru-guru di sekolah-sekolah terhadap agama akan berubah sehingga murid-murid akan mencintai agama pada umumnya dan agamanya sendiri pada khususnya. Sedangkan pada poin ketiga, yaitu tentang kewajiban pengajaran agama Islam

[74] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi murid beragama Islam tidak disepakati di Badan Pekerja. Gagasan yang disampaikan oleh Prawoto terdapat tiga poin yaitu:

1. Pengajaran agama harus diberikan pada jam pertama atau jam terakhir dari jam pelajaran, dan anak-anak yang tidak mengikuti pelajaran itu dapat pulang atau tinggal kelas.
2. Kepala sekolah tidak bertanggung jawab terhadap isi pengajarannya dan hanya bertanggung jawab administratif saja.
3. Istilah *verplicht leervak* (mata pelajaran wajib), jangan diartikan sebagai *facultative leervak* (mata pelajaran pilihan) karena pengajaran fakultatif berarti bahwa murid-murid yang memilih pelajaran tersebut tidak menjadi penentuan kenaikan kelas, berbeda dengan mata pelajaran wajib yang menjadi penentu kenaikan kelas.[75]

C. Pemikiran Prawoto Mangkusasmito Tentang Dakwah Kemasyarakatan

Sebagaimana telah dipaparkan di bab sebelumnya, Prawoto tidak hanya aktif dan berkarir di ranah politik praktis. Setelah Masyumi dibubarkan dan keluar dari tahanan, ia aktif di beberapa kegitan dakwah dan kemasyarakatan seperti Dewan Da'wah Islamiyyah Indonesia, mendirikan Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI), penasehat Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), penasehat Serikat Tani Islam Indonesia (STII), pendakwah di masjid Al-Azhar maupun di forum-forum lainnya.

Soal kehidupan bermasyarakat, Prawoto pun memberikan pemahaman kepada umat agar dapat hidup rukun dengan suku, agama, maupun ras apapun.

[75] Ibid., 69-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia menyeru kepada umat agar memahami betul kondisi demografis bangsa Indonesia yang beragam. Soal keberagaman tersebut salah satunya disampaikan Prawoto dalam rapat bersama yang dilakukan di Kompleks Masjid Agung Al-Azhar pada 14 Agustus 1966. Rapat tersebut merupakan sebuah penyambutan bagi pemimpin-pemimpin Muslim terutama pimpinan Masyumi, yang baru dibebaskan dari tahanan Orde Lama. Pada saat itu Ia mengaku mendapat pertanyaan tentang sikapnya atas Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Prawoto menegaskan: "Saya menerima sesuai *formulering* yang tercantum di dalam Dekrit." Ia menjelaskan bahwa sikap Umat Islam ketika telah membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut supaya dipegang benar-benar. Pada kesempatan tersebut Ia juga menyebut soal kehadiran berbagai ideologi dalam politik Indonesia:

> Kita oleh sejarah, oleh keadaan geografi, ditakdirkan hidup di satu daerah untuk menegakkan negara bersama-sama…. Yang partai Islam tetap partai Islam. Yang partai Kristen tetap partai Kristen. Yang partai nasional tetap partai nasional. Dan dari bidangnya masing-masing memegang rumusan itu sebagai pegangan bersama…. Soalnya ialah bukan senang atau tidak senang, bukan puas atau tidak puas, tetapi faktar sejarah menunjukkan bahwa di situlah terdapat pertemuan antara golongan-golongan bermacam-macam tadi…. Bahwa di kalangan tiap-tiap umat itu selalu terdapat golongan-golongan yang tidak selalu cocok pikirannya satu sama lain, itu lumrah. Malah Islam sendiri mengajarkan bahwa perbedaaan pendapat itu adalah rahmat Allah. Itulah sebabnya, Islam memerintahkan supaya kita ini bermusyawarah. [76]

Meski Prawoto masih memperhatikan soal politik pasca Masyumi bubar dan tidak menjabat dalam struktur politik apapun, namun Prawoto masih giat dalam menyuarakan isu kenegaraan. Namun begitu, soal kenegaraan

[76] Ibid., 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak dikemas dalam bentuk politik murni, namun lebih banyak dikemas dalam bentuk dakwah keagamaan maupun sosial, terutama saat berada di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sebagaimana yang pernah diucap oleh M. Natsir, "Kalau dulu kita berdakwah lewat politik maka sekarang ini kita berpolitik lewat dakwah,"[77]

Ketika Prawoto menghadiri pertemuan Ikatan Masjid seluruh Jakarta Raya (IMJ) pada Ahad pagi 26 Januari 1969, ia menyeru kepada para mubalig Islam di Jakarta untuk meningkatkan aktivitasnya kearah lagkah-langkah yang terorganisir dan terkonsolidasi. Para muballig tersebut perlu meningkatkan kualitasnya, buku-buku dan kitab-kitab yang digunakan, serta lebih merespon terhadap persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Peningkatan-peningkatan tersebut, menurut Prawoto, dapat dicapai dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan periodik antara muballig untuk dapat bertukar pikiran dan pengalaman.

Salah satu persoalan yang Prawoto peringatkan kepada para muballig adalah tentang Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang saat itu sedang dibahas dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, undang-undang tersebut akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap pembinaan keluarga sebagai sendi kehidupan umat. Usulan Prawoto tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Taufiqurrachman selaku Ketua IMJ yang berharap agar setiap kota di Jakarta segera menunjuk wakilnya untuk menduduki perwakilan IMJ di daerahnya masing-masing. Untuk itu diharapkan

[77] Hakiem, et al., *Pendiri dan Pemimpin Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula para pengurus masjid di setiap kota (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur) segera mengadakan rapatnya masing-masing.[78]

Sebagai seorang pemimpin umat yang sekaligus dalam usia yang semakin tua, Prawoto juga menaruh perhatian pada generasi muda. Pada salah satu acara mahasiswa di Riau pada 5 Juli 1969, Prawoto berpesan kepada para mahasiswa agar senantiasa merapatkan barisan untuk melawan segala bentuk ancaman yang muncul. Sebagaimana Masyumi yang muncul untuk merespon adanya upaya-upaya politik dalam rangka mendegradasi nilai-nilai Islam di tataran kenegaraan. Bahaya dari luar itu yang menurut Prawoto, dapat menyatukan umat. Ia menegaskan:

> …. Bahwa ternyata umat yang berserakan itu menjadi satu, mendekatkan barisannya satu sama lain kalau menghadapi gemblengan-gemblengan, pukulan-pukulan, dan bahaya dari luar. Jadi persatuannya, pada hakikatnya baru persatuan yang didorong atau ditekan oleh kekuatan-kekuatan dari luar tubuh umat Islam sendiri, belum merupakan persatuan yang timbul dari kesadaran dan bersama yang mendalam.[79]

Mimbar-mimbar yang dilakoni oleh Prawoto tidak hanya mimbar dakwah dan Pemuda. Salah satu aktivitas Prawoto pasca purna dari Masyumi adalah menjadi penasihat perkumpulan buruh. Salah satunya adalah Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM) yang berdiri pada tahun 1957. Prawoto aktif rihlah di beberapa daerah untuk mengedukasi para buruh. Namun sebagai seorang politisi, isu kenegaraan tetap disampaikan dalam mimbar-mimbar

[78] Majalah Abadi 1 Februari 1969 dalam S.U. Bajasut dan Lukman Hakiem, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 155.
[79] Ibid., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Termasuk mimbar dakwah dan kepemudaan yang telah disampaikan sebelumnya.

Pada acara Konferensi KBIM wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan pada 11 Oktober 1969 di Malang, Prawoto Mangkusasmito memberikan ceramahnya pada penutupan konferesensi tersebut. Saat itu, Prawoto mengajak kepada para peserta konferensi yang berasal dari kalangan buruh agar selalu mentaati konstitusi dan UU yang sah. Bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah agar diterima. Partisipasi buruh dalam pengambilan kebijakan pemerintah pun agar ditingkatkan. Prawoto menyatakan:

> Melalui tempat ini saya ingin mengemukakan satu pemikiran kepada Pemerintah. Dalam menghadapi masalah modal yang hendak ditanamkan di Indonesia ini, yang pemikiran dan pelaksanaannya kerap kali menuju kepada pembelian-pembelian dan sebagainya di luar negeri, hendaknya dalam tugas ini yang turut berkepentingan, yakni golongan buruh, diikutsertakan.[80]

Beberapa aktivitas dan pemikiran yang diungkapkan oleh Prawoto di sejumlah agenda baik agenda politik, dakwah, kepemudaan, dan kepada golongan buruh, komitmen Prawoto terhadap taat konstitusi dan hukum yang berlaku tidak berubah sejak ikutnya ia dalam politik praktis hingga purna dari politik praktis tersebut. Meskipun, seruan-seruan yang diucapkan oleh Ketua Umum Masyumi terakhir tersebut masih berkisar soal perlunya partisipasi umat Islam dalam agenda-agenda politik kenegaraan, baik untuk kalangan pendakwah, pemuda, hingga kaum buruh. Bagi Prawoto, amanat penderitaan

[80] Ibdi., 366-367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat ialah: “masyarakat adil dan makmur, yang dalam istilah kalangan Islam lazim disebut *baldatun thayyibatun wa robbun ghafur*.”[81]

[81] Dalam Risalah Perundingan Konstituante Djilid II Tahun 1959, lihat S.U. Bajasut dan Lukman Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

GERAKAN PRAWOTO MANGKUSASMITO TERKAIT ISLAM DAN NEGARA

A. Gerakan Prawoto Mangkusasmito Terhadap Politik Islam

Gerakan Prawoto dalam bidang politk Islam aktif dan masif saat ia berada di partai Masyumi. Ia aktif di partai tersebut dari awal pendirian hingga ia terpilih menjadi ketua umum. Beberapa hal dilakukan oleh Prawoto untuk menjadi Islam sebagai dasar negara, serta agar UU yang berjalan di Indonesia setara dengan ajaran agama Islam.

Ciri gerakan Prawoto yaitu formalisme, artinya berada dalam garis-garis batas hukum dan tidak melanggar konstitusi yang berlaku. Berdasarkan kesaksian Zainal Arifin, seorang tokoh politik muslim saat itu, menceritakan bahwa Prawoto menyarankan agar fraksinya menerima UUD 1945 sesuai dengan amanat Presiden Soekarno dalam dekritnya pada 22 April 1959 dengan catatan bahwa keseluruhan jiwa UUD tersebut diterima dan bukan kata demi kata. Ia mempengaruhi anggota-anggota lain di fraksi Masyumi dalam suatu debat intern. Padahal saat itu, fraksi Masyumi di pimpin oleh Boerhanoenddin Harahap.[82]

Pada sidang Konstituante tanggal 4 Mei 1959, Prawoto mengajukan dua versi mukadimah. Pertama, mukadimah seperti sekarang. Kedua, mukadimah seperti yang ada dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Dalam pidatonya

[82] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, ia menegaskan kepada anggota Konstituante yang beragama non-muslim agar tidak perlu khawatir atas kewajiban menjalankan syariat Islam. Prawoto mengungkapkan, "… kami tidak berkeberatan sedikit pun jika saudara-saudara di dalam rumusan itu menginginkan jaminan untuk penunaian syariat agama di golongan saudara". Karena pernyataan-pernyataan itulah, Prawoto disebut Zainal sebagai tokoh politik yang rasional. Meskipun begitu, hasil sidang Konstituante tersebut tidak sesuai yang diharapkan oleh kalangan Islam. Sidang-sidang diboikot oleh blok non-Islam dan menyerah pada keputusan dekrit, yaitu pembubaran Konstituante.[83]

Kegagalan usahanya di Konstituante pun tidak lantas memberhentikan langkah Prawoto dalam mengupayakan sahnya Piagam Jakarta sebagai dasar negara Indonesia. Terlebih saat Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin dan membuat Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 7 Tahun 1959 mengenai syarat penyederhanaan kepartaian. Kekuasaan Soekarno semakin menguat sementara pihak oposisi menjadi semakin lemah, termasuk Masyumi. Prawoto, sebagai ketua umum Masyumi saat itu, bergerak melalui media cetak. Salah satunya adalah majalah Abadi.[84]

Dalam tulisannya di majalah Abadi, Prawoto mengkritik penetapan Presiden tersebut. Disebutkan dalam pada pasal 9 ayat (1) angka (1), bahwa: "Presiden sesudah mendengar Mahkamah Agung, dapat melarang dan/atau

[83] Ibid., 55.

[84] Surat kabar Abadi adalah surat kabar yang dibuat oleh Masyumi dan pertama kali terbit pada 2 Januari 1950. Harian Abadi dipimpin oleh Suardi Tasrif. Selain Abadi, terdapat pula surat kabar yang dibuat oleh partai lain seperti Suluh Indonesia (PNI), Duta Masyarakat (NU), serta Harian Rakjat dan Warta Bhakti (PKI). Andi Suwirta, Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional, *Sosiohumanika*, 1(2), 2008, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membubarkan partai yang bertentangan dengan asas dan tujuan negara." Prawoto mempertanyakan atas hal tersebut karena partainya, Masyumi, berasaskan Islam. Bisa jadi asas Islam yang ada dalam salah satu partai akan dianggap bertentangan dengan asas negara. Ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 12/1959, disebutkan bahwa Presiden dapat memberhentikan setiap waktu anggota MPRS antar waktu yang ternyata tidak menyetujui manifesto politik Soekarno. Peraturan-peraturan tersebut, menurutnya, hanyalah kebijaksanaan semata, bukan merupakan pembinaan hukum sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Soekarno. Lebih jauh, Prawoto mengatakan: "Dekrit Presiden justru menunjukkan ditinggalkannya Trias Politika yang berarti bukan untuk kembali ke UUD1945".[85]

Soekarno pula, disebut Prawoto, mengingkari janjinya bahwa kalangan Islam dipersilakan untuk berjuang mengubah undang-undangan sesuai keinginannya melalui badan permusyawaratan rakyat. Berdasar janji itulah, umat Islam mendirikan Masyumi dan berjuang melalui dewan Konstituante. Namun pada prakteknya, pemerintah justru mengusulkan agar kembali ke UUD 1945. Usul pemerintah tersebut dihadapi oleh fraksi-fraksi dari partai Islam seperti Masyumi, NU, PSII, dan PERTI. Tujuan yang ingin dicapai adalah penggunan Piagam Jakarta yang memuat bunyi: "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Pada akhirnya, Soekarno

[85] Ghazali, et al., *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan: Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingkari janjinya sendiri dengan membubarkan Konstituante serta secara sepihak mengembalikan dasar negara ke UUD 1945.[86]

Tindakan represif Soekarno terhadap Masyumi dan perlawanan Prawoto tidak berhenti di situ saja. Prawoto yang menjabat sebagai ketua umum partai tersebut dipaksa bubar oleh Presiden lewat Keputusan Presiden Nomro 200/1960. Beberapa aktivis Masyumi yang terlibat pemberontakan PRRI/PERMESTA dijadikan dalih oleh Soekarno bahwa Masyumi membahayakan. Pembubaran partai tersebut dirasa Soekarno dibutuhkan demi kepentingan bangsa dan negara.[87]

Prawoto pun melawan. Ia menyatakan bahwa alasan demi kepentingan keselamatan bangsa dan negara sungguh bertentangan dengan kenyataan. Keputusan pembubaran Masyumi disebut tidak disertai pembuktiannya, merupakan tindak perkosa, dan bertentangan dengan rasa keadilan. Prawoto menyatakan: "Apakah ini sila kemanusiaan yang hendak ditegakkan di negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa ini… Salah satu langkah kearah itu ialah Ketua Umum partai telah memajukan tuntutan kepada Pengadilan Negara Istimewa di Jakarta untuk membatalkan tindakan-tindakan yang kami anggap melawan hukum". Prawoto memang mengajukan gugatan melalui kuasa hukum Mohammad Roem. Namun gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan lewat Ketetapan No. 753/1960 Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta.[88]

---

[86] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 249-255.
[87] Artawijaya, *Belajar Dari Partai Masyumi*, 37.
[88] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Masyumi dibubarkan, beberapa aktivisnya pun ditangkap termasuk Prawoto. Mereka ditahan atas dalih mengancam keamanan negara. Namun sesudah Orde lama runtuh dan diganti Orde Baru, serta Prawoto keluar dari tahanan, mantan ketua umum partai Masyumi itu tidak berhenti dari politik. Ia mengirim surat kepada Soeharto yang saat itu menjadi Pejabat Presiden dan meminta agar Masyumi direhabilitasi. Ia ingin pelarangan partainya dicabut dan meminta jaminan agar eks aktivis Masyumi mendapat dan mempergunakan hak-hak politiknya. Pada akhirnya, Soeharto mengabulkan satu dari dua permintaan tersebut: rehabilitasi Masyumi tidak tidak diterima, dan bekas anggota Masyumi masih dilindungi hak demokrasinya seperti aturan perundangan yang ditegakkan.[89]

Prawoto lebih lanjut mengatakan soal keinginannya untuk menerapkan hukum Islam melalui jalur politik:

> orang yang benar-benar memperjuangkan Islam tidak bisa lain dari bertujuan supaya hukum Islam berlaku dan terutama untuk si pejuang sendiri, hukum Islam dengan segara batas dan larangannya, yang tidak boleh pula dilanggar oleh si Muslim yang kebetulan sedang berkuasa. Demikian pula di dalam negara hukum. Masyumi memperjuangkan negara hukum. Untuk itu berusaha supaya mendapat kekuasaan, tidak sebagai tujuan, tetapi sebagai alat penegak hukum. Kekuasaan itu tidak boleh dipakai untuk melanggar hukum.[90]

[89] Ibid., 275.
[90] Ibid., 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gerakan Prawoto Mangkusasmito Terhadap Pendidikan

Gerakan Prawoto dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Prawoto dilakukan dalam dua kondisi. Pertama, dilakukan di dalam parlemen melalui sidang BP KNIP. Sedangkan yang kedua adalah melalui lembaga pendidikan seperti Sekolah Tinggi Islam (STI) dan Yayasan Asrama Peljar Islam (YAPI).

Di dalam sidang Badan Pekerja, Prawoto yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi, berupaya agar mata pelajaran agama Islam dijadikan mata pelajaran wajib dan menentukan kenaikan kelas siswa di sekolah negeri. Selain itu kebijakan wajib belajar untuk anak usia 8 hingga 14 tahun agar juga dapat berlaku di madrasah. Karena sebelumnya, ketentuan wajib belajar hanya berlaku di sekolah yang ada di bawah binaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Misi menjadikan madrasah sebagai lembaga yang berlaku untuk pemenuhan wajib belajar ini tercapai. Namun untuk pelajaran agama di sekolah negeri, tidak berjalan lancar.[91]

Kekuatan Masyummi hanya ¼ dari jumlah anggota Badan Pekerja hadir. Perdebatan-perdebatan terjadi. Adu argumentasi itu berlangsung hingga tiga hari dan dua kali *deadlock* untuk satu pembahasan saja, yaitu perkara pelajaran agama. Prawoto menyatakan: “yang kita kehendai ialah pelajaran agama menjadi pelajaran yang dimestikan, untuk penganut-penganutnya. Artinya, murid Islam harus diberi pelajaran Islam, murid-murid Kristen pun diberi pelajaran Kristen juga”. Perdebatan tersebut kemudian menghasilkan kompromi:

[91] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dalam sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut."[92]

Akan tetapi hasil kompromi tersebut diinterupsi oleh pimpinan fraksi Masyumi, Mr. Sartono. Menurutnya, hasil kompromi tersebut tidaklah jelas. Apakah kewajiban tersebut berlaku di semua tingkatan (taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, menengah atas, sekolah kejuruan, perguruan tinggi), dan apakah pelajaran tersebut memengaruhi kenaikan kelas. Perdebatan pun terjadi kembali. Blok PNI mengajukan amandemen yang menyatakan bahwa ketentuan detail soal jenis sekolah dan cara penerapannya, akan ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang tentang pendidikan tersendiri. Usul tersebut, ditolak oleh fraksi Masyumi karena masih kabur dan tidak ada kepastian atas penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah. Lebih lanjut Prawoto menyatakan: "Karena mengetahui hal terpenting ini kita telah menyatakan pendirian kita menolak, maka mengenai kelanjutannya, bagaimanapun redaksi diperbaikinya, toh undang-undang akan kita tolak juga, sehingga sikap kita untuk selanjutnya tidak bisa lain daripada *abstain*." Pada akhirnya, usaha itu pun tidak berhasil.

Medan kedua yang dilakukan oleh Prawoto di bidang pendidikan adalah melalui lembaga pendidikan. Lembaga pertama adalah Sekolah Tinggi Islam. Ia menjadi Sekretaris II dan seterusnya menjadi anggota pengurusnya. Ia juga pernah menjadi kruator Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Sedangkan lembaga yang kedua adalah Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI).

[92] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A.M. Fatwa[93] menyebut Prawoto adalah pendiri utama YAPI dan menjadi "bukti sahih besarnya perhatian Prawoto terhadap proses kaderisasi pemimpin umat dan bangsa. Tempat untuk menyemai bibit-bibit unggul…." Prawoto merintis berdirinya YAPI di Rawamangun pada 1952. Sebagai ketua umum pertama, ia bersama teman-temannya seperti Wartomo Dwidjoyuwono, Sindian Djajadiningrat, Joesdi Ghazali, Djamilus Nurut, Ismael Hasan, dan Hariri Hady, mengelola asrama mahasiswa Sunan Gunung Jati di Jalan Bunga nomor 7 Jatinegara. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1962, mereka mendirikan asrama mahasiswa Sunan Giri di Jalan Sunan Giri nomor 1 Rawamangun. Suatu ketika, teman Prawoto saat berada di JIB dan Masyumi, Syamsuridjal yang saat itu menjabat sebagai Walikota Jakarta Raya, menghibahkan sebidang tanah di Kebayoran Baru. Di atas tanah itulah kemudian dibangun masjid besar yang kelak, saat Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Mahmud Syaltut datang ke masjid tersebut, dia memberi nama Al-Azhar untuk masjid itu.[94] Adapun YAPI saat ini telah berubah nama menjadi Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam dan telah menaungi banyak sekolah Al-Azhar di seluruh Indonesia.[95]

---

[93] A. M. Fatwa adalah Ketua Pembina Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI) di tahun 2013. Ia tergolong sebagai aktivis Muhammadiyah sejak masih muda dan pernah dijebloskan ke tahanan oleh pemeritah Orde Baru. Setelah reformasi, ia aktif dalam politik sebagai salah satu deklarator Partai Amanat Nasional (PAN) dan masuk parlemen pada tahun 1999. C. W. Watson dan Muhajir Arif Rahmat, *Membaca A. M. Fatwa; Perubahan dan Konsistensi*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), 43.

[94] Hakiem dan Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 17.

[95]Administrator, "Sejarah YAPI", https://yapi.sch.id/index.php/component/content/article/88-yapi/business/174-sejarah-yapi, (9 September 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Gerakan Prawoto Mangkusasmito terhadap Dakwah dan Sosial

Prawoto Mangkusasmito tidak berhenti dalam menjalankan peran meskipun telah usai dari Masyumi. Sebelum akhirnya Prawoto selesai di Masyumi, ia memiliki jabatan-jabatan yang ia jalankan peran tersebut hingga akhir hayatnya. Ia tercatat aktif sebagai anggota Dewam Dakwah Islamiyyah Indonesia, penasihat Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM) dan penasihat Sarekat Tani Islam Indonesia (STII).

Di dalam Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM)[96], Prawoto menjabat sebagai penasihat sejak tahun 1957, atau saat KBIM itu berdiri. Dalam beberapa kesempatan seperti Konferensi sebagaimana dijelaskan pada bab III, Prawoto memberikan nasihat-nasihat kepada para buruh agar turut andil dan aktif dalam penyusunan kebijakan oleh pemerintah.

Selain di serikat buruh, penasihat KBIM itu juga diangkat sebagai penasihat Sarekat Tani Islam Indonesia (STII)[97] Prawoto Mangkusasmito bahkan menjalani jabatan ini hingga akhir hayatnya. Prawoto meninggal dunia saat melakukan perjalanan dalam melaksanakan jabatannya sebagai penasihat STII.

---

[96] Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM) adalah serikat buruh yang menyempal dari Sarekat Buruh Islam Indonesia (SBII) pada 1957. SBII merupakan organisasi sayap Masyumi di bidang buruh. Karena terjadi perbedaan pendapat dalam pemilihan pimpinan, beberapa orang SBII mendirikan KBIM. https://historia.id/politik/articles/serikat-buruh-islam-indonesia-memilih-seteru-antara komunis-atau-majikan-PMLXe/page/3, diakses pada 23 Juli 2021. Adapun SBII mempunyai prinsip apabila gerakan buruh berhasil memperjuangkan tuntutannya, maka yang mengenyam langsung adalah buruh bersangkutan seperti kenaikan upah, dan mendapat bonus. SBII menyeru kepada kaum buruh agar berpegang teguh pada persatua dan jangan ada permusuhan antara buruh dengan majikan agar terjadi keharmonisan. Soegiri DS & Edi Cahyono, *Gerakan Serikat Buruh; Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 52.

[97] Sarekat Tani Islam Indonesia adalah organisasi perkumpulan petani yang disponsori oleh Masyumi yang dibentuk pada tahun 1946. Kemajuan STII dicapai karena organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berdiri pada tahun 1945 banyak diisi oleh para Marxis yang kemudian menjadi pimpinan BTI. Karena itulah, banyak anggota BTI yang bergabung ke STII. Ahmad Fathul Bari, "Strategi Partai Komunis Indonesia terhadap Petani dan pengaruhnya di Jawa Timur (1953-1965)", (Skripsi, Universitas Indonesia, 2008), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pertengahan tahun 1970, Prawoto berkeliling Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta untuk mengisi serangkaian pelatihan STII. Prawoto kemudian bertemu dengan para petani yang berada di Temuguruh, Banyuwangi. Dalam kunjungannya itulah, Prawoto wafat pada 24 Juli 1970.[98]

Berdasar pada fenomena di atas, maka dalam kasus STII ini, Prawoto juga menjalankan fungsinya sebagai penasihat aktif. Ia turun ke bawah (*tourni*) ke berbagai daerah untuk berbincang dengan petani-petani sembari memberikan pesan kepada mereka. Sebagaimana diungkap Natsir dan telah dipaparkan di bab II, Prawoto pernah mengatakan:

> Apabila saya kembali dari *tourni*, melihat kampung-kampung dan desa-desa, berbicara dengan pak tani yang lemah itu, yang tidak pandai membaca surat kabar, dan yang tak pernah disebut-sebut namanya dalam surat kabat, saya merasa mendapat satu kekuatan baru. Saya melihat keadaan mereka, saya membicarakan dengan mereka persoalan-persoalan hidup yang langsung mereka hadapi, saya kembali dengan harapan baru. Hal itu tidak saya jumpai di dalam masyarakat, di kota-kota yang besar, yang bertimbun-timbun denggan lekturnya yang banyak. Kekuatan dari pimpinan itu sendiri terletak di tangan kaum yang lemah.[99]

Dalam bidang dakwah, secara legal Prawoto tergabung dalam Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII). DDII dibentuk dalam bentuk sebuah yayasan. Bentuk yayasan dipilih karena pengurusannya hanya melalui akta notaris sehingga tidak ada kecurigaan dari Pemerintah sebagai usaha lain untuk merehabilitasi Masyumi. Pendirian organisasi dakwah ini diangankan mampu menyinari umat tanpa memicu suara berisik serta polusi yang bersifat politis.

---

[98] Hakiem, et al, *Pendiri dan Pemimpin Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia*, 13.
[99] Ibid., 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka pada 9 Mei 1967, dalam Akta Notaris Nomor 4, didirikanlah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan sepuluh orang pendiri yaitu: Moh. Natsir (Ketua), H.M. Rasjidi (Wakil Ketua), Buchari Tamam (Sekretaris), Nawawi Duski (Sekretaris II), H. Hasan Basri (Bendahara), H.M. Daud Datuk Palimo Kayo (Anggota), K.H. Taufiqurrahman (Anggota), Prawoto Mangkusasmito (Anggota), Abdul Hamid (Anggota), H. Abdul Malik Ahmad (Anggota).[100]

Dalam bidang dakwah tersebut, Prawoto aktif dalam ceramah-ceramah, terutama ceramah yang berlangsung di masjid Al-Azhar. Dalam suatu pertemuan Ikatan Masjid seluruh Jakarta Raya (IMJ) pada Ahad pagi 26 Januari 1969, ia menyeru kepada para mubalig Islam di Jakarta untuk meningkatkan aktivitasnya ke arah lagkah-langkah yang terorganisir dan terkonsolidasi. Para muballig tersebut perlu meningkatkan kualitasnya, buku-buku dan kitab-kitab yang digunakan, serta lebih merespon terhadap persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Peningkatan-peningkatan tersebut, menurut Prawoto, dapat dicapai dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan periodik antar muballig untuk dapat bertukar pikiran dan pengalaman.

Salah satu persoalan yang Prawoto peringatkan kepada para muballig adalah tentang Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang saat itu sedang dibahas dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, undang-undang tersebut akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap pembinaan keluarga sebagai sendi kehidupan umat. Usulan Prawoto tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Taufiqurrachman selaku Ketua IMJ yang

[100] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berharap agar setiap kota di Jakarta segera menunjuk wakilnya untuk menduduki perwakilan IMJ di diaerahnya masing-masing. Untuk itu diharapkan pula para pengurus masjid di setiap kota (Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, serta Jakarta Selatan) segera mengadakan rapatnya masing-masing.[101]

[101] Bajasut dan Hakiem, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka kiranya penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prawoto hidup sebagai aktivis Islam di beberapa organisasi Islam dari masa mudanya hingga akhir hayatnya. Masa mudanya ia habiskan di Jong Islameten Bond dan Studenten Islam Club. Saat dewasa ia berada di banyak sektor diantaranya pendidikan (Sekolah Tinggi Islam) dan YAPI (Yayasan Asrama Pelajar Islam), politik (Masyumi), dakwah (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), dan sosial kemasyarakatan (Kongres Buruh Islam dan Sarekat Tani Islam Indonesia).
2. Prawoto memiliki pemikiran bahwa nilai-nilai Islam harus masuk dalam konstitusi dan undang-undang negara. Untuk itulah umat Muslim di segala bidang baik pemuda, pendakwah, hingga buruh harus turut aktif dalam sistem dan partisipasi kenegaraan.
3. Prawoto menjalankan gerakan dan peranannya dalam 3 bidang, yakni: politik, pendidikan, dan dakwah kemasyarakatan. Dalam bidang politik, ia bergerak melalui Masyumi. Di bidang pendidikan, ia bergerak melalui STI dan YAPI. Di bidang dakwah kemasyarakatan, ia bergerak melalui DDII, KBMI, dan STII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait pemikiran dan peranan Prawoto Mangkusasmito terhadap Islam dan negara, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam, hendaknya lebih banyak meneliti tokoh-tokoh Islam yang masih belum banyak diteliti seperti Prawoto Mangkusasmito ini atau seperti Soekiman Wirjosandjojo dibanding tokoh yang telah banyak diteliti seperti Natsir dan Wahid Hasyiim. Hal ini agar teladan dan khazanah yang dapat dikonsumsi oleh umat Muslim semakin banyak dan beragam.
2. Bagi para pembaca, hendaknya mengambil *ibroh* dan teladan dari apa yang sudah dipaparkan. Hal ini tentunya agar hal-hal baik dari Prawoto Magkusasmito dapat diteruskan atau menginspirasi kita khususnya dalam memajukan Islam di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustaka, 1981.

Artawijaya. *Belajar Dari Partai Masyumi*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014.

Arumdani, Vicky Maria Ely. "Perjuangan Partai Mayumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam Bidang Politik 1955-1959". Skripsi, Universitas Sanata Dharma, 2008.

Bajasut, S.U; Hakiem, Lukman. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi ke-2*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.

Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*. Jakarta: Serambi. 2006.

DS; Edi Cahyono, Soegiri. *Gerakan Serikat Buruh; Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra, 2003.

F. Isnaeni, Hendri. "Serikat Buruh Islam Indonesia, Memilih Seteru Antara Komunis atau Majikan", dalam https://historia.id/politik/articles/serikat-buruh-islam-indonesia-memilih-seteru-antara-komunis-atau-majikan-PMLXe/page/3 (23 Juli 2021).

Fathul Bari, Ahmad. "Strategi Partai Komunis Indonesia terhadap Petani dan pengaruhnya di Jawa Timur (1953-1965)". Skripsi, Universitas Indonesia, 2008.

Ghazali, Zulfikar, et al. *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo*. Jakarta: Depdikbud IDSN, 1998.

Hakiem, Lukman et al. *Pendiri dan Pemimpin Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.* Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2017.

Hakiem, Lukman. *Jejak Perjuangan Para Tokoh Muslim Mengawal NKRI*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.

Imran, Amrin, et al. *Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Citra Pendidikan, 2003.

Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926- 1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 200 tahun 1960

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuntowijoyo. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

----------. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Latif, Yudi. *Inteligensia Musli dan Kuasa; Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan.* Jakarta: LP3ES, 1996.

Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1995.

Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965.* Jakarta: Grafiti Press, 1987.

Saidi, Ridwan. *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Sayoga, Budi Harjo. *Kamus Sejarah Indonesia Jilid II Nation Building.* Jakarta: Direktorat Sejarah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanpa tahun.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sudrajat, A. Suryana. *Kearifan Guru Bangsa, Pilar Kemerdekaan.* Jakarta: Erlangga, 2006.

Suhardono, Edi. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1994.

Suwirta, Andi. Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional, *Sosiohumanika*, 1(2), 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id